

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH **LKJIP**



DINAS SOSIAL
TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS SOSIAL**

Jl. Raden Wijaya No. 15 Jombang 61411
Telp. (0321) 8493687, Fax. -, e-mail: dinsos@jombangkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG
NOMOR: 400.1.1/101/415.20/2026**

TENTANG

**PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP)
DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2025**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) setiap perangkat daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan
- b. Bahwa untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2025, perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) melalui Surat Keputusan Kepala Dinas
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta tata cara Evaluasi Rancangan Perda RPJPD dan RPJMD

6. Dokumen perjanjian kinerja tahun 2025
7. DPA Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Laporan Kinerja Individu (LKJiP) Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Laporan kinerja individu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rencana kerja tahun berikutnya
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 23 Maret 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN JOMBANG



AGUNG HARIADI, ST, MM

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta sebagai media evaluasi atas pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan ini juga merupakan implementasi dari prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Selama tahun berjalan, Dinas Sosial Kabupaten Jombang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), peningkatan akses layanan sosial, serta penguatan tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang baik, dengan sebagian besar indikator kinerja berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Namun demikian, kami menyadari bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai keterbatasan dan tantangan yang perlu terus diperbaiki. Oleh karena itu, laporan ini juga memuat analisis kinerja serta upaya perbaikan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana aksi ke depan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Besar harapan kami, laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Jombang, 23 Maret 2026
**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATENJOMBANG**



AGUNG HARIADI, ST, MM
NIP. 19701126 200212 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	2
1.3. Mandat dan Peran Strategis Perangkat Daerah	11
1.4. Isu Strategis	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis.....	14
2.2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n	25
2.3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n+1	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	27
3.1.1 Capaian kinerja organisasi dari tahun ke tahun.....	27
3.1.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun n.....	28
3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir.....	40
3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah.....	49
3.1.5 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional.....	55
3.1.6 Efisiensi penggunaan sumber daya.....	69
3.2. Realisasi Anggaran	75
BAB IV PENUTUP	78
4.1. Kesimpulan	78
4.2. Inovasi dan Penghargaan	78
4.3. Upaya Perbaikan	78

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Penetapan IKU
3. KKPT
4. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
5. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja
6. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi
7. Pengukuran Kinerja

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial dihadapkan pada dinamika permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks, baik dari sisi jumlah, ragam, maupun Tingkat kerentanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Kondisi kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, kerentanan anak dan lanjut usia, serta dampak sosial akibat bencana dan guncangan ekonomi menuntut adanya intervensi sosial yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Dalam menjawab tantangan tersebut, Dinas Sosial melaksanakan berbagai program yang diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar bidang sosial (SPM bidang sosial), perlindungan dna jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial masyarakat. Program-program tersebut tidak hanya berorientasi pada penanganan dampak sosial jangka pendek melalui bantuan sosial, tetapi juga pada upaya penguatan kapasitas individu dan keluarga miskin agar mampu keluar dari kondisi kerentanan secara berkelanjutan.

Seiring dengan itu, keberadaan sekolah rakyat menjadi salah satu strategi intervensi sosial yang dijalankan secara kolaboratif untuk memutuskan rantai kemiskinan antargenerasi. Sekolah rakyat diposisikan sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial anak dari keluarga miskin dan rentan, melalui peningkatan akses terhadap layanan Pendidikan dan pendampingan sosial. Peran Dinas Sosial dalam program ini difokuskan pada penetapan sasaran berbasis data keluarga, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar intervensi yang diberikan bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Namun demikian, dalam pelaksanaan program-program tersebut masih dihadapkan pada sejumlah kondisi yang mempengaruhi kinerja, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kualitas dan pemutakhiran data

kesejahteraan sosial yang belum optimal, serta layanan sosial yang belum sepenuhnya berbasis manajemen kasus. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya capaian kinerja program dan efektivitas sekolah rakyat sebagai instrumen penanganan kemiskinan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) menjadi sangat penting dan strategis sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Sosial atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. LKJiP disusun untuk menggambarkan Tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan, sekaligus menjadi alat evaluasi atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan urusan sosial. Penyusunan LKJiP merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Melalui LKJiP, Dinas Sosial dapat mengidentifikasi permasalahan kinerja, mengukur dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan sosial, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan kinerja ke depan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan SPM bidang sosial dan penguatan intervensi strategis seperti sekolah rakyat.

Dengan demikian, penyusunan LKJiP menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program Dinas Sosial tidak hanya menghasilkan keluaran kegiatan, tetapi juga memberikan hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial yang merata dan berkelanjutan.

1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jombang berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang sosial.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Sosial Kabupaten Jombang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang sosial
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial
- e. penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial
- f. pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

selanjutnya tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Jombang diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu :

1. Kepala Dinas

Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan

- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan, anggaran dan perundang-undangan
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik
- h. Pengelolaan asset
- i. Pengelolaan kearsipan
- j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan system informasi
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Penilaian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) di lingkup Dinas
- m. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur (SOP) serta standar pelayanan public (SPP)
- n. Melaksanakan koordinasi implementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan reformasi birokrasi

- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikasn oleh Kepala Dinas Sosial.

Adapun sekretaris membawahi:

2.1 Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan;
- b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga
- c. Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- d. Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kerja pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- e. Menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- f. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya;
- g. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- h. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- i. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- j. Merencanakan kebutuhan barang dan jasa;
- k. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian barang dan jasa;
- l. Melaksanakan perawatan dan perbaikan barang-barang inventaris;
- m. Melaksanakan pengelolaan dan pengamanan aset;
- n. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan barang-barang inventaris;

- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 3. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang rehabilitasi sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dalam rehabilitasi sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang rehabilitasi sosial mempunyai fungsi:

 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, gelandangan pengemis serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza
 - b. Perumusan pedoman penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, gelandangan pengemis serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza
 - c. Bimbingan teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, gelandangan pengemis serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza
 - d. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, gelandangan pengemis serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza
 - e. Pengawasan penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, gelandangan pengemis serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial
- 4. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

Bidang pemberdayaan kelembagaan sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang pemberdayaan kelembagaan sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala bidang pemberdayaan kelembagaan sosial mempunyai fungsi:

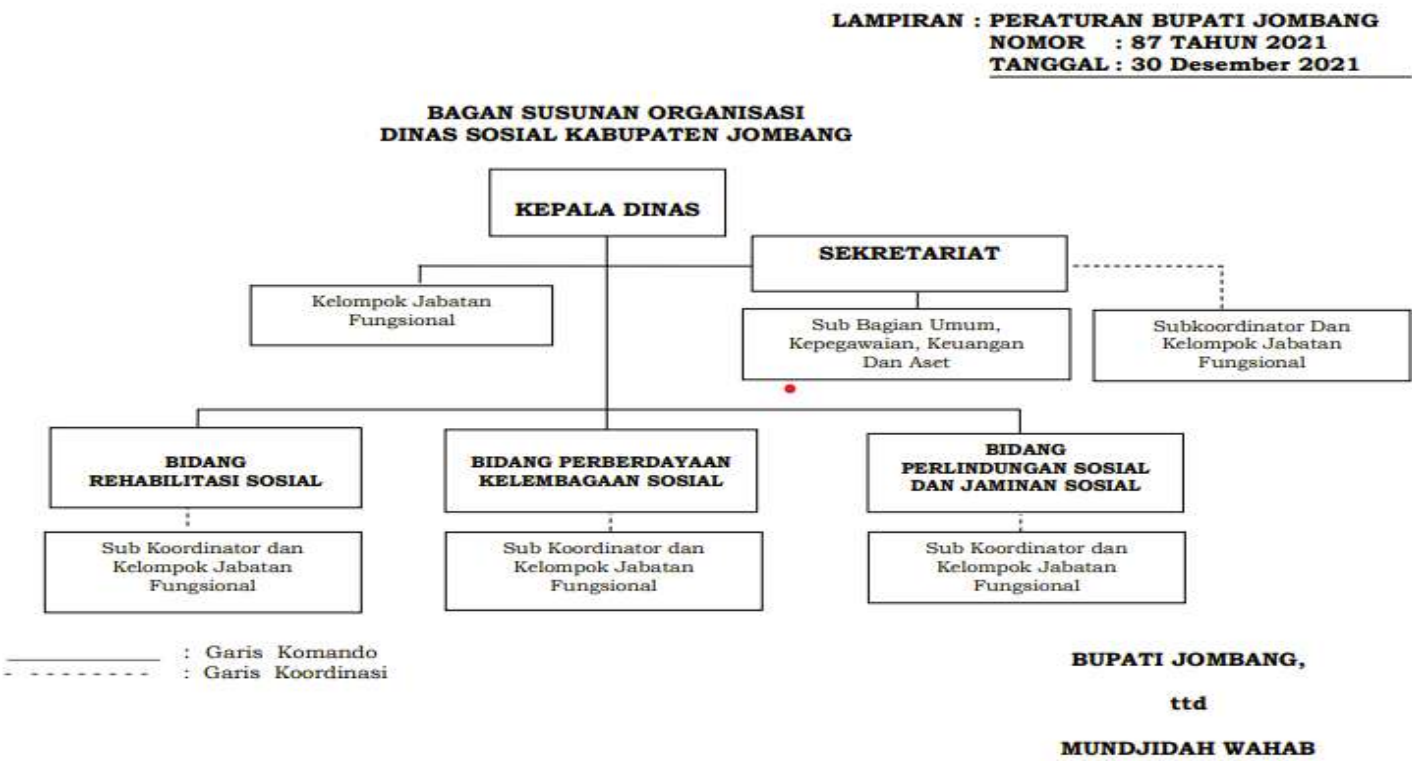
- a. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial perorangan, pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial kelembagaan, pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, pengelolaan taman makam pahlawan, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial perorangan, pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial kelembagaan, pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, pengelolaan taman makam pahlawan, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial
- c. Penyusunan pedoman penyelenggaraan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial perorangan, pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial kelembagaan, pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, pengelolaan taman makam pahlawan, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial
- d. Pemberian bimbingan teknis pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial perorangan, pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial kelembagaan, pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, pengelolaan taman makam pahlawan, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial
- e. Pelaksanaan koordinasi teknis pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial perorangan, pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial kelembagaan, pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah,

- pengelolaan taman makam pahlawan, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial
- f. Pengawasan penyelenggaraan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial perorangan, pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial kelembagaan, pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, pengelolaan taman makam pahlawan, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.
5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Bidang perlindungan dan jaminan sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Sebagian tugas Dinas Sosial dibidang perlindungan dan jaminan sosial. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana
 - c. Penyusunan pedoman penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana
 - d. Pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
 - e. Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan bidang perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana
 - f. Perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana
 - g. Pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.2.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial



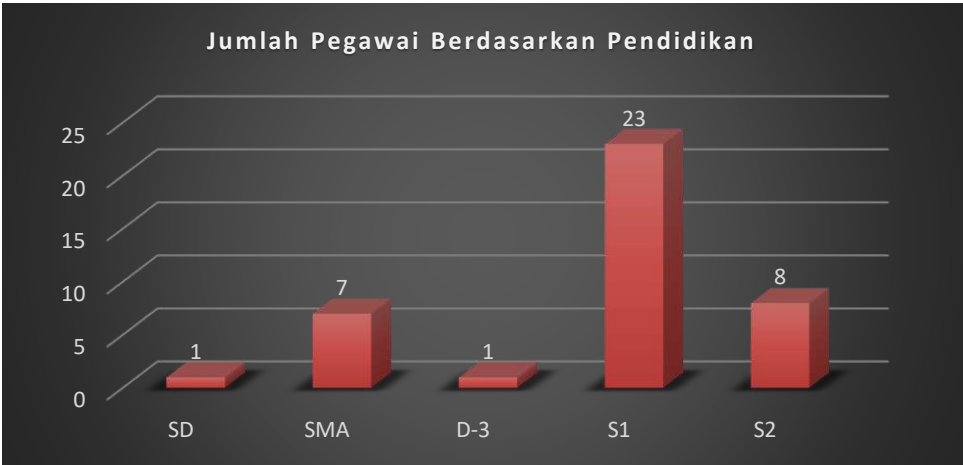
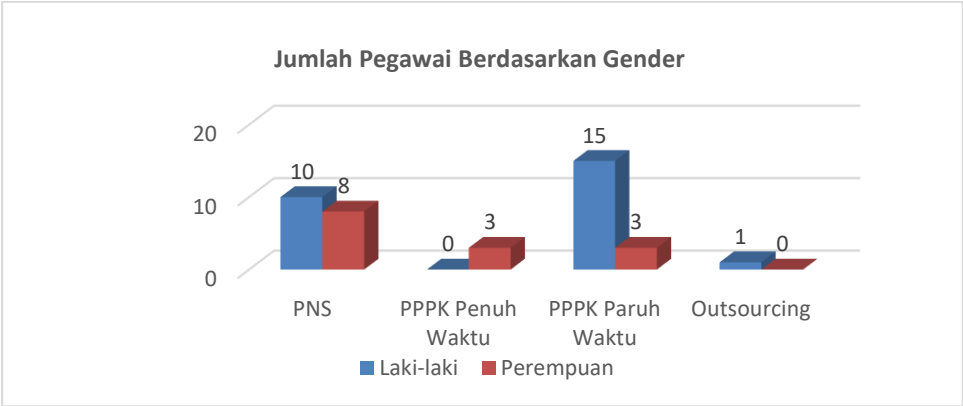
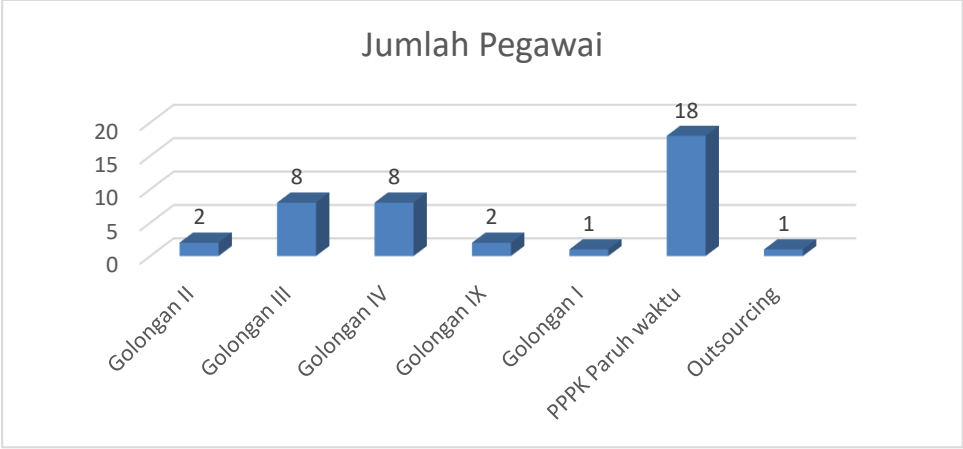
1.2.3 Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Jombang

KOMPOSISI SDM

Pelaksanaan tugas Dinas Sosial didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Jumlah pegawai Dinas Sosial per 31 Desember 2025 sebanyak 39 orang pegawai, yang terdiri dari 18 orang PNS dan 3 orang PPPK Penuh Waktu serta 18 orang PPPK Paruh Waktu

Komposisi pegawai laki-laki dan Perempuan di Dinas Sosial jauh berbeda, yaitu 35% Perempuan, dan 65% laki-laki.

Dari sisi Pendidikan 77,5% pegawai Dinas Sosial berlatar belakang Pendidikan tinggi (S1 s.d S2),





1.3 Mandat dan Peran Strategis Perangkat Daerah

Mandat Dinas Sosial

Dinas sosial mempunyai mandat utama untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana diamanat dalam peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 Urusan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
 Negara dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara, khususnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
 Pemerintah daerah wajib memenuhi SPM bidang sosial sebagai bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat.
4. Peraturan Menteri Sosial dan

Peran Strategis Dinas Sosial

Dinas sosial berperan strategis sebagai pengampu utama penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar bidang sosial, penanganan fakir miskin dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), serta penanggulangan kemiskinan dan kerentanan. Dinas Sosial menjalankan fungsi koordinatif dan integrative dalam penyediaan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan sosial pada situasi kedaruratan, dengan mengedepankan pendekatan terpadu, berbasis data, dan akuntabel guna mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

1.4 Isu Strategis

Isu Strategis Internasional/global

Isu strategis penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak dapat dilepaskan dari dinamika global hingga local yang saling mempengaruhi. Sustainable development goals masih menjadi isu pada tataran internasional/global, masih tingginya kemiskinan multidimensi, ketimpangan sosial, dampak perubahan iklim, serta meningkatnya risiko bencana dan krisis glonal menimbulkan tekanan terhadap sistem perlindungan sosial, khususnya bagi kelompok rentan seperti fakir miskin, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Kondisi ini menuntut adanya sistem layanan sosial yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan

Isu Strategis Nasional

1. Target kemiskinan dibawah 4,5%
2. Sinergi antar pemerintah dan non pemerintah
3. Ketepatan sasaran penerima bantuan sosial
4. Standar pelayanan minimal (SPM) urusan sosial di daerah
5. Care economy

Care economy memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Adanya transformasi dalam pemberian bantuan sosial ke arah ekonomi digital melalui digitalisasi bantuan sosial memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu pemerintah pusat perlu melakukan investasi pada care economy guna menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

6. Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan kesos
7. Kelemahan monitoring dan evaluasi

Isu Strategis Regional

Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja, perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup

Isu Strategis Kabupaten

Salah satu isu strategis Kabuapten Jombang yang relevan dengan urusan bisang sosial, yakni peningkatan kesejahteraan sosial melalui intervensi yang tepat terhadap PPKS (pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial) yang difokuskan pada penduduk miskin melalui pendekatan terintegrasi dengan melibatkan multi stakeholder

Isu Strategis Dinas Sosial

1. Peningkatan jangkauan dan efektivitas layanan sosial terhadap PPKS
2. Peningkatan sistem intervensi sosial yang komprehensif dan terintegrasi lintas sektor yang berdampak pada penanganan permasalahan sosial secara terpadu dan berkelanjutan
3. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial
4. Peningkatan kualitas data PPKS dan data sosial untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat
5. Rendahnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi bencana

BAB 2

Perencanaan Kinerja

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis Dinas Sosial disusun dengan mengacu pada dokumen **Renstra Perangkat Daerah** serta dijabarkan lebih lanjut dalam **Renja dan RKA tahun berjalan (tahun ke-n)** sebagai bentuk implementasi tahunan. Dalam Renstra, telah ditetapkan arah kebijakan yang selaras dengan RPJMD, yaitu mendukung terwujudnya visi “Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua” melalui peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Amanat strategis dalam Renstra menekankan pada pencapaian tujuan meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan sasaran utama meningkatnya akses terhadap layanan sosial. Sasaran tersebut diukur melalui indikator kinerja seperti persentase PPKS yang mendapatkan layanan sosial, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial, indeks pemenuhan kebutuhan dasar, serta indeks peranan sosial. Selain itu, Renstra juga mengamanatkan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif melalui peningkatan nilai reformasi birokrasi perangkat daerah.

Selanjutnya, dalam Renja dan RKA tahun berjalan, amanat Renstra tersebut diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan prioritas yang lebih operasional, antara lain program perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta program penunjang urusan pemerintahan. Perencanaan tahunan ini disusun dengan prinsip money follows program dan berbasis kinerja, sehingga alokasi anggaran

difokuskan pada kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama.

Selain itu, perencanaan juga mempertimbangkan isu strategis daerah seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan sinergi lintas sektor. Dengan demikian, keterkaitan antara Renstra dan Renja/RKA tahun berjalan menunjukkan kesinambungan perencanaan yang sistematis, terarah, dan berorientasi hasil dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Jombang.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target tahunan					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya kesejahteraan sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial		Persentase penurunan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	0	1,2	1,32	1,56	1,68	1,8	1,92
	Meningkatnya akses terhadap layanan sosial	Indeks pemenuhan kebutuhan dasar	60,82	60,82	60,83	60,84	60,85	60,86	60,87
		Persentase capaian SPM bidang sosial	99,05	100	100	100	100	100	100
		Indeks peranan sosial	76,31	76,31	76,32	76,33	76,34	76,35	76,36
	Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks reformasi birokrasi PD	75,59	75,65	75,7	75,75	75,8	75,85	75,9

Tabel 2.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial tahun 2025-2029

2.3 Tabel Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Naik/ Turun
	Program: penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kab Jombang	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100 %	5.190.631.859	5.460.560.689	269.928.830
	Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab Jombang	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100 %	112.067.950	108.289.950	(3.778.000)
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab Jombang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	8.077.950	4.299.950	(3.778.000)
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Kab Jombang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	103.990.000	103.990.000	0

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Naik/ Turun
	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab Jombang	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100 %	3.711.547.214	3.805.468.545	93.921.331
			Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100 %			
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab Jombang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang/ bulan	3.517.281.864	3.615.777.695	98.495.831
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	181.944.000	181.513.500	(430.500)
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab Jombang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3.235.350	3.235.350	-
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ tribulanan/ semester SKPD	Kab Jombang	Jumlah laporan keuangan bulanan/ tribulanan/ semester SKPD yang disusun	17 laporan	9.086.000	4.942.000	(4.144.000)
	Kegiatan :	Kab	Persentase pemenuhan	100%			(11.400.000)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Naik/ Turun
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jombang	administrasi kepegawaian		11.400.000	-	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab Jombang	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	19 paket	11.400.000	-	(11.400.000)
	Kegiatan : administrasi umum perangkat daerah	Kab Jombang	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerapan bangunan kantor	Kab Jombang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	5.602.100	6.650.900	1.048.800
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab Jombang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	17.380.900	17.380.900	-
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab Jombang	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1.920.000	1.920.000	-
	Penyediaan bahan logistic kantor	Kab Jombang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 paket	99.805.000	102.005.000	2.200.000
	Penyediaan barang cetakan dan	Kab Jombang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang	5 paket			

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Naik/ Turun
	penggandaan		disediakan		10.871.700	10.871.700	-
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab Jombang	Jumlah dokumen bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	5.556.000	5.556.000	-
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab Jombang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	86.490.500	86.490.500	-
	Kegiatan : pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Jombang	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	117.030.500	169.216.000	52.185.550
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Jombang	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	49 unit	117.030.500	169.216.000	52.185.550
	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Kab Jombang	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	568.376.780	593.543.080	25.166.300

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Naik/ Turun
	daerah						
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Jombang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	127.800.000	127.800.000	-
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Jombang	Jumla laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	440.576.780	465.743.080	25.166.300
	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab Jombang	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	442.583.215	553.168.064	110.584.849
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab Jombang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	41.610.000	41.610.000	-
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	Kab Jombang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	36 unit	251.574.971	197.049.820	(54.525.151)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Naik/ Turun
	operasional atau lapangan						
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Jombang	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	123.218.244	283.218.244	160.000.000
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan	Kab Jombang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	45 unit	26.180.000	31.290.000	5.110.000
	Program pemberdayaan sosial	Kab Jombang	Persentase SDM Kesos tersertifikasi	42,3%	1.381.611.750	1.352.174.025	(29.437.725)
			Persentase LKS yang terakreditasi	7,6%			
	Kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota	Kab Jombang	Persentase rekomendasi pengumpulan sumbangan atau UGB yang dikeluarkan Persentase rekomendasi pengumpulan sumbangan atau undian gratis berhadiah yang dikeluarkan	75 %	13.037.500	10.457.125	- (2.580.375)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Naik/ Turun
	Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Kab Jombang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	15 dokumen	13.037.500	10.457.125	(2.580.375)
	Kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Kab Jombang	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial mendapatkan peningkatan SDM	87,1 %	1.368.574.250	1.341.716.900	(26.857.350)
	Peningkatan kemampuan potensi pekerjaan sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Kab Jombang	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	310 orang	270.804.500	261.338.450	(9.466.050)
	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Kab Jombang	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	21 orang	151.051.600	145.561.495	(5.490.105)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Naik/ Turun
	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	Kab Jombang	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/ kota	160 keluarga	40.490.000	36.192.600	(4.297.400)
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten-Kota	Kab Jombang	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/ kota	87 lembaga	892.224.400	885.500.730	(6.723.670)
	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Kab Jombang	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kewenangan kabupaten/ kota	35 sertifikat	14.003.750	13.123.625	(880.125)
	Program Rehabilitasi sosial	Kab Jombang	persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar,	6,3 %	1.776.349.350		118.413.000

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Naik/ Turun
			gelandangan pengemis di luar panti sosial yang berhasil direhabilitasi			1.894.762.350	
			Persentase PPKS lainnya bukan korban HIV/ AIDS dan napza di luar panti sosial yang berhasil direhabilitasi	100%			
	Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Kab Jombang	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 %	1.565.750.450	1.709.428.450	143.678.000
	Penyediaan permakanan	Kab Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakaan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/ kota	460 orang	1.145.750.000	1.358.613.750	212.863.750
	Penyediaan sandang	Kab Jombang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan	120 orang	40.858.300	40.858.300	-

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Naik/ Turun
			kabupaten/ kota				
	Penyediaan Alat Bantu	Kab Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/ kota	42 orang	58.250.000	58.250.000	-
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Kab Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/ kota	100 orang	139.553.500	82.647.750	(56.905.750)
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Kab Jombang	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	130 orang	136.050.000	131.050.000	(5.000.000)
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab Jombang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	70 orang	27.903.650	27.503.650	(400.000)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Naik/ Turun
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	17.385.000	10.505.000	(6.880.000)
	Kegiatan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/ AIDS dan napza di luar panti	Kab Jombang	Persentase PPKS lainnya bukan korban HIV/ AIDS dan napza di luar panti sosial yang direhabilitasi	100 %	210.598.900	185.333.900	(25.265.000)
	Penyediaan sandang	Kab Jombang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	70 orang	27.349.000	27.349.000	-
	Penyediaan perbekalan Kesehatan di luar panti	Kab Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/ Kota	70 orang	24.500.000	24.500.000	-
	Pemberian	Kab	Jumlah peserta bimbingan	270 orang			

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Naik/ Turun
	bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Jombang	fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota		123.606.150	115.071.150	(8.535.000)
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Kab Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	12.625.000	6.597.500	(6.027.500)
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Kab Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/ kota	50 orang	22.518.750	11.816.250	(10.702.500)
	Program perlindungan dan jaminan sosial	Kab Jombang	Persentase masyarakat miskin dan rentan yang mendapatkan perlindungan sosial	26%	16.196.513.388	28.377.436.188	12.180.922.800
			Persentase data terpadu kesejahteraan sosial yang valid	67,5%			
			Persentase masyarakat miskin dan rentan yang mendapatkan jaminan sosial	86,5%			
	Kegiatan pengelolaan data fakir miskin	Kab Jombang	Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS	100 %	16.196.513.388	28.377.436.188	12.180.922.800

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Naik/ Turun
	cakupan daerah kabupaten/kota		Persentase keluarga miskin dan rentan dalam DTKS yang menerima bantuan sosial	79,1%			
			Persentase penerima bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	100 %			
	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Kab Jombang	Jumlah fakir miskin cakupan daerah kabupaten/ kota yang didata	685 orang	273.966.000	240.009.250	(33.956.750)
	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Kab Jombang	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/ kota	662.028 keluarga	22.584.500	12.274.500	(10.310.000)
	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Kab Jombang	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial	17.270 orang	15.605.131.338	27.901.741.888	12.296.610.550
	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Kab Jombang	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/ kota	140 orang	294.831.550	223.410.550	(71.421.000)
	Program bencana	Kab Jombang	Persentase kejadian bencana yang tertangani	100 %	522.799.700	741.555.100	218.755.400
			Persentase desa siaga	15,3%			

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Naik/ Turun
			bencana yang aktif				
	Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/ kota	Kab Jombang	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial	100 %	370.010.200	563.387.200	193.377.000
	Penyediaan makanan	Kab Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	7900 orang	298.285.200	491.662.200	193.377.000
	Penyediaa sandang	Kab Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapannya lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kabupaten/ kota	100 orang	36.000.000	36.000.000	-
	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Kab Jombang	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/ kota	1 unit	9.350.000	9.350.000	-
	Penanganan khusus kelompok rentan	Kab Jombang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan	200 orang	16.540.000	16.540.000	-

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Naik/ Turun
			Kabupaten/ Kota				
	Pelayanan dukungan pskososial	Kab Jombang	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/ kota	200 orang	9.835.000	9.835.000	-
	Kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/ kota	Kab Jombang	Persentase desa /kelurahan siaga bencana	13,1 %	152.789.500	178.167.900	25.378.400
			Persentase Taruna Siaga Bencana (tagana) yang aktif	100%			
	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana	Kab Jombang	Jumlah kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/ kota	40 kampung	32.829.500	28.217.900	(4.611.600)
	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Kab Jombang	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten / kota	36 orang	119.960.000	149.950.000	29.990.000

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Naik/ Turun
	Program pengelolaan taman makam pahlawan	Kab Jombang	Persentase sapras taman makam pahlawan (TMP) yang sesuai standar	95 %	104.308.160	154.308.161	50.000.001
	Kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/ kota	Kab Jombang	prasarana taman makam pahlawan nasional (TMPN) dalam kondisi baik	95%	104.308.160	154.308.161	50.000.001
	Rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Kab Jombang	umlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	1 dokumen	89.449.160	139.449.161	50.000.001
	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/ kota	Kab Jombang	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan kabupaten/ kota	1 makam	14.859.000	14.859.000	-
J U M L A H					25.172.214.207	34.882.300.682	9.710.086.475

2.2 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU merupakan ukuran kinerja strategis yang ditetapkan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam renstra. IKU bersifat jangka menengah dan menjadi tolok ukur utama kontribusi perangkat daerah terhadap sasaran Pembangunan daerah. IKU dirumuskan secara selektif, berorientasi pada outcome, serta mencerminkan mandat dan fungsi utama perangkat daerah.

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2025

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Penghitungan/ Penjelasan	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
Terpenuhinya kebutuhan dasar Masyarakat miskin dan rentan	Persentase Masyarakat miskin dan rentan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Formulasi penghitungan : $= \frac{\sum \text{miskin \& rentan yg terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\sum \text{penduduk}} \times 100\%$ $= \frac{\sum \text{miskin \& rentan penerima layanan pangan, pangan, pendidikan, kesehatan} \times 100\%}{\sum \text{penduduk}}$	52 persen	Dinas Sosial	Kepala Dinas
Definisi Operasional : Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan makanan dan non makanan Penduduk/ Masyarakat miskin adalah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan Masyarakat miskin adalah masyarakat/ kelompok orang yang tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan dasar meliputi kebutuhan	Definisi operasional : Kebutuhan dasar bagi Masyarakat miskin dan rentan adalah pemenuhan layanan pangan, pangan, pendidikan dan kesehatan. Kebutuhan dasar tersebut dipenuhi melalui program sembako, PKH, PBID, PBIN, bansos APBD. Program sembako merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dengan bantuan sosial, yang diberikan kepada individu tau keluarga yang memenuhi kriteria dan berhak menerima bantuan sembako. Distribusi bantuan ini dilakukan setiap bulan atau	$= \frac{\sum \text{Penerima PKH} + \text{bansos sembako} + \text{bansos APBD} + \text{PBID} + \text{PBIN}}{\sum \text{penduduk}}$			

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Penghitungan/ Penjelasan	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam hal ini adalah Masyarakat yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang telah mendapatkan bantuan dari pemerintah sebagai upaya dalam pengentasan kemiskinan, misal : PKH, bantuan sembako, PBI Masyarakat rentan miskin adalah masyarakat yang hidup disekitar garis kemiskinan tetapi tidak selalu terhitung sebagai penduduk/masyarakat miskin. Mereka sering luput dari perhatian karena focus kebijakan pada Masyarakat yang sudah tergolong miskin. Ex : seseorang yang telah terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) akan tetapi termasuk dalam desil 3 dan 4 ataupun masyarakat yang belum terdata dalam DTKS. Masyarakat yang rentan miskin ini lebih mudah terdampak dan jatuh ke bawah	tiga abulan melalui system non tunai menggunakan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan Tujuan dan manfaat PKH, antara lain : a. Mengurangi kemiskinan b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia c. Mengurangi rantai kemiskinan PBIN & PBID Pembayaran pembayaran iuran daerah merupakan inisiatif yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola pembayaran kontribusi iuran peserta jaminan kesehatan. Melalui program BPJS Kesehatan PBI (Peserta penerima bantuan), pemerintah menyediakan jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. Iuran kepesertaan BPJS Kesehatan PBI dibayarkan pemerintah pusat melalui				

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Penghitungan/ Penjelasan	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
garis kemiskinan jika terjadi inflasi, PHK, perubahan kebijakan pemerintah (seperti penyesuaian BBM), bencana alam. Pada indicator persentase masyarakat miskin dan rentan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Penyebut menggunakan jumlah penduduk, karena sasaran/pembilang bukan hanya masyarakat dalam DTKS akan tetapi masyarakat yang rentan miskin di luar DTKS sebagai akibat perubahan kebijakan pemerintah, bencana alam, PHK,	APBN (PBIN), atau pemerintah daerah melalui APBD (PBID) Bansos APBD, merupakan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan program bantuan yang bertujuan untuk membantu individu, keluarga, atau masyarakat yang mengalami kerentanan sosial.				
Meningkatnya kemandirian sosial Masyarakat miskin dan rentan	Persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemandirian sosialnya		10,47 persen	Dinas sosial	Kepala Dinas
PMKS yang berganti istilah menjadi PPKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan/	Definisi operasional : PPKS yang mandiri (PPKS yang keluar dari kepesertaan program keluarga harapan (PKH) atau graduasi dari PKH	Formulasi : $= \frac{\sum \text{KPM PKH graduasi}}{\sum \text{penerima PKH}} \times 100\%$			

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Penghitungan/ Penjelasan	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
kesulitan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan wajar	a. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH b. Graduasi merupakan berakhirnya kepesertaan sebagai KPM PKH. Graduasi dibagi menjadi 2 jenis, yakni graduasi alamiah dan graduasi sejahteraan mandiri PPKS yang mandiri (PPKS yang keluar dari kepesertaan program) PKH secara graduasi mandiri, yakni berakhirnya kepesertaan KPM PKH karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH, hal ini dapat terjadi karena inisiatif KPM sendiri maupun dorongan dari pendamping sosial atau pihak lainnya	$= (5547/53001) \times 100\%$ $= 10,47\%$			
Terlaksananya peranan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		100 persen	Dinas sosial	Kepala Dinas
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah	Definisi operasional : Mendasar Pemensos Nomor 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan sosial, potensi sumber kesejahteraan sosial				

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Penghitungan/ Penjelasan	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
daerah dan Masyarakat. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara meliputi aspek : 1. Rehabilitasi sosial, Mendasar pada Permensos Nomor 4 Tahun 2020, rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan yang memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima dalam pelayanan rehabilitasi sosial dasar berupa : a. Data dan pengaduan (diusulkan dalam DTKS) b. Kedaruratan (penjangkauan, rujukan) c. Pemenuhan kebutuhan dasar : - Permakanan - Sandang	(PSKS) adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau Masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jenis-jenis PSKS : 1) Pekerja sosial profesional 2) Pekerja sosial Masyarakat 3) Taruna Siaga Bencana 4) Lembaga kesejahteraan sosial 5) Karang taruna 6) Keluarga pioneer 7) Wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis Masyarakat 8) Wanita pemimpin kesejahteraan sosial 9) Penyuluh sosial 10) Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan 11) Dunia usaha	Formulasi : $= \frac{\sum \text{PSKS aktif dlm penyelenggaraan kesos}}{\sum \text{PSKS}} \times 100\%$ $= (\% \text{ PSKS perorangan aktif}) + (\% \text{ PSKS kelembagaan aktif})$ psks perorangan aktif (406) : 36 tagana, 152 Pendamping PKH, 21 TKSK, 197 PSM psks kelembagaan aktif (309) : 1 LK3, 328 kartar, 40 LK5			

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Penghitungan/ Penjelasan	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
- Alat bantu - Perbekalan kesehatan - Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial - Bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlanjar, anak terlanjar, lanjut usia terlanjar, serta gelandangan pengemis - Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, kartu identitas anak - Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar - Penelusuran keluarga - Reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial - rujukan 2. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin					

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Penghitungan/ Penjelasan	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, seperti jaminan kecelakaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan 3. Pemberdayaan sosial merupakan strategi peningkatan "daya" atau kekuatan (power) individu, Lembaga dan komunitas. Tujuan pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan Masyarakat terutama kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ketidakberdayaan 4. Perlindungan sosial adalah Upaya pemerintah guna mendukung Masyarakat untuk dapat menghadapi berbagai kerentanan/guncangan di sepanjang siklus kehidupan. Dalam masa krisis, pemerintah memberikan perlindungan sosial untuk					

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Penghitungan/ Penjelasan	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
menjaga daya beli Masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan. Bantuan sosial merupakan skema perlindungan sosial yang bersifat non kontribusi sehingga Masyarakat tidak perlu membayar iuran, diantaranya (PKH, PIP, KIP kuliah, Jaminan Kesehatan nasional (JKN)					
Tercapainya SPM bidang sosial	Persentase capaian SPM bidang sosial		100 persen	Dinas sosial	Kepala Dinas
	Definisi operasional : Standar pelayanan minimal (SPM) adalah ketentuan jenis dan mutu layanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan waji daerah yang berhak diperoleh setiap penyandang masalah kesejahteraan secara minimal Jenis layanan dasar pada SPM bidang sosial kabupaten/kota, yaitu : 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Penghitungan indeks pencapaian SPM (IP SPM) yaitu : Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan PP No. 2 tahun 2018, IP SPM meliputi : a. Capaian mutu pelayanan dasar Merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub indikator kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan SDM sesuai dengan standar teknis b. Capaian penerima pelayanan dasar			

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Penghitungan/ Penjelasan	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
	2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial 5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Merupakan capaian yang diperoleh melalui target dan indikator kinerja Formula penghitungan : $IP\ SPM = (\% \text{ pencapaian mutu minimal layanan dasar} \times BM) + (\% \text{ pencapaian penerima layanan dasar} \times BP)$ % indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar : Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub indikator kinerja pencapaian minimal barang, jasa dan SDM sesuai dengan standar teknis % indeks pencapaian penerima layanan dasar Dalam mencapai target SPM di daerah BM : bobot mutu minimal layanan dasar sebesar 20 BP : bobot penerima layanan dasar sebesar 80			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP OPD	Nilai AKIP tahun n	A (81,95)	Dinas Sosial	Sekretariat
	Definisi operasional : Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan				

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Penghitungan/ Penjelasan	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
	peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)				
Meningkatnya keterlibatan Masyarakat dalam pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan restorasi sosial	Persentase pihak-pihak yang berperan serta dalam pelestarian dan penanaman nilai kepahlawanan dan keperintisan, nilai kesetiakawanan sosial serta restorasi sosial				Kepala Dinas
Mendasar pada Permensos Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional, bahwa untuk pelestarian nilai kepahlawanan dan menjunjung tinggi nilai kesetiakawanan sosial serta mengokohkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan keberadaan taman makam pahlawan nasional. Taman makam pahlawan berfungsi sebagai wujud penghargaan dan penghormatan terhadap jasa-jasa para pahlawan/pejuang	Definisi operasional : Pelestarian dan penanaman nilai kepahlawanan merupakan Upaya yang sangat penting dalam memastikan bahwa semangat dan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh para pahlawan tetap hidup dan relevan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Kesetiakawanan sosial adalah nilai luhur yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dulu. Nilai ini mengandung makna solidaritas, tenggang rasa, dan gotong royong antara individu dalam masyarakat.	Formulasi : $\frac{\sum \text{pihak yg aktif}}{\sum \text{pihak terkait}} \times 100\%$ $= \frac{(12/14)}{14} \times 100\%$ $= 85\%$	85 persen	Dinas sosial	Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Penghitungan/ Penjelasan	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
sebagai sarana pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan sebagai obyek studi dan ziarah.	Restorasi sosial adalah Upaya yang diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi sosial Masyarakat yang mengalami kondisi mudurnya atau melemahnya nilai-nilai jati diri atau kepribadian bangsa sehingga dapat Kembali pada kondisi idealnya. Tujuan restorasi sosial adalah untuk merespon tantangan perubahan zaman dan memastikan nilai-nilai tersebut tetap relevan dan menginspirasi generasi sekarang dan yang akan datang Pelestarian dan penanaman nilai kepahlawanan merupakan tanggung jawab Bersama, dan melibatkan berbagai pihak. Berikut beberapa cara dan pihak yang dapat berperan dalam menghargai jasa para pahlawan : 1. Pemerintah dan Lembaga - Penganugerahan gelar pahlawana nasional menghargai jasa pahlawan dengan memberikan penghargaan secara resmi - Memakamkan pahlawan di tempat terhormat				

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Penghitungan/ Penjelasan	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Membangun makam pahlawan sebagai tempat peringatan dan penghormatan - Mengabadikan nama pahlawan Memberi nama jalan, gedung atau monument untuk mengenang jasa para pahlawan 2. Masyarakat umum - Memperingati peristiwa penting ikut serta dalam peringatan hari pahlawan dan momen-momen bersejarah lainnya - Meneladani sikap pahlawan - Berani menyuarakan pendapat, berkontribusi pada Masyarakat dan memperjuangkan kebenaran - Mengajarkan nilai kepahlawanan - Mewariskan nilai-nilai kebangsaan dan patriotism kepa generasi muda 3. Sekolah dan Pendidikan - Mengintegrasikan materi pahlawan - Mengajarkan Sejarah perjuangan pahlawan dalam kurikulum - Kegiatan peringatan - Mengadakan upacara dan kegiatan yang menghargai jasa pahlawan 4. Media dan teknologi - Menyebarkan informasi				

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Penghitungan/ Penjelasan	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Media massa dan sosial dapat mengedukasi Masyarakat tentang peran pahlawan Menggunakan teknologi Memanfaatkan teknologi untuk memperkuat kesadaran akan nilai-nilai kepahlawanan.				


**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN JOMBANG**
 HARI PURNOMO, AP, M.E

Perjanjian kinerja adalah dokumen penugasan dan komitmen kinerja yang memuat kesepakatan antara pimpinan instansi/perangkat daerah dengan atasan langsung (kepala daerah) mengenai sasaran, indikator, dan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran, sebagai dasar pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi kinerja instansi

a. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penyusunan perjanjian kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada rencana strategis (renstra) Dinas Sosial tahun 2024-2026 yang disusun mengacu pada rencana Pembangunan daerah (RPD) tahun 2024-2026 sebagai dokumen perencanaan Pembangunan daerah pada masa transisi.

RPD 2024-2026 menjadi landasan penetapan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan Pembangunan daerah, sementara renstra perangkat daerah berfungsi sebagai penjabaran teknis kewenangan dan peran Dinas Sosial dalam mendukung pencapaian sasaran Pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial.

No	Sasaaran strategis	Indicator kinerja	target
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan	Persentase massyarakat miskin dan rentan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	52,00%
2	Meningkatnya kemandirian sosial masyarakat miskin dan rentan	Persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemandirian sosialnya	10,47%
3	Terlaksananya peranan sosial dalam penyelenggaraan kersejahteraan sosial	Persentase partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%
4	Tercapainya SPM bidang sosial	Persentase capaian SPM bidang sosial	100%
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi AKIP OPD	81,95 nilai
6	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelestaria nilai kepahlawanan, keberintisan, kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial	Persentase pihak-pihak yang berperan serta dalam pelestarian dan penanaman nilai kepahlawanan dan keberintisan, nilai kesetiakawanan sosial serta restotasi sosial	85%

No	Sasaran Program	Program	Indikator Program	Target	Anggaran
1	Meningkatnya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	5.190.631.659
2	Meningkatnya kapasitas dari potensi sumber kesejahteraan sosial	Program pemberdayaan sosial	Persentase SDM kesejahteraan sosial tersertifikasi	42,3%	1.381.611.750
3	Meningkatnya kapasitas dari potensi sumber kesejahteraan sosial	Program pemberdayaan sosial	Persentase LKS yang terakreditasi	7,6%	

No	Sasaran Program	Program	Indikator Program	Target	Anggaran
4	Meningkatnya penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang berhasil direhabilitasi	Program rehabilitasi sosial	Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis di luar panti yang berhasil direhabilitasi	6,3%	1.776.349.350
5	Meningkatnya PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan napza di luar panti sosial yang berhasil direhabilitasi	Program rehabilitasi sosial	Persentase PPSK lainnya bukan korban HIV/AIDS dan napza di luar panti yang berhasil direhabilitasi	100%	
6	Meningkatnya fakir miskin yang mendapatkan perlindungan sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase masyarakat miskin dan rentan yang mendapatkan perlindungan sosial	26%	16.196.513.388
7	Meningkatnya fakir miskin yang mendapatkan jaminan sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase masyarakat miskin dan rentan yang mendapatkan jaminan sosial	86,5%	
8	Meningkatnya mutu data terpadu kesejahteraan sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase data terpadu kesejahteraan sosial yang valid	67,5%	
9	Tertanganinya korban bencana tepat waktu	Program penanganan bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100%	522.799.700
10	Meningkatnya desa/kelurahan siaga bencana	Program penanganan bencana	Persentase desa siaga bencana	15,3%	
11	Meningkatnya pengelolaan taman makam pahlawan kabupaten/kota	Program pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase sarana dan prasarana taman makam pahlawan (TMP) yang sesuai standar	104.308.160	

KERTAS KERJA PENETAPAN TARGET

Kertas kerja penetapan target digunakan sebagai instrument analitis untuk menetapkan target kinerja yang tercantum dalam PK. Kertas kerja ini memuat

dasar perhitungan dan pertimbangan penetapan target, antara lain capaian kinerja tahun sebelumnya (baseline), tren capaian, kapasitas sumber daya, kebijakan dan prioritas.

Tabel 2.5 Kertas Kerja Penetapan Target Dinas Sosial tahun 2025

No	Indikator kinerja utama/individu	Keterkaitan dengan komponen perencanaan program/ kegiatan	Target tahun n-1	Realisasi tahun n-1	Target tahun n	satuan	Analisis/ dasar penetapan
1	Persentase masyarakat miskin dan rentan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		35,3	51,1	52	persen	bertambahnya program pemerintah untuk masyarakat miskin dan rentan
2	Persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemandirian sosialnya		9,9	11,58	10,47	persen	KPM PKH graduasi adalah KPM PKH yang keluar dari kepesertaan program ditetapkan berdasarkan aturan resmi dari Kemesos dan hasil evaluasi berkala terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga penerima manfaat. KPM keluar dari program karena sudah mampu secara sosial ekonomi dan menyatakan diri tidak membutuhkan bantuan lagi (tidak memenuhi komponen bantuan kesehatan, pendidikan, sosial)
3	Persentase partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		100	100	100	persen	PSKS yang terdata aktif dalam penyelenggaraan keseos
4	persentase capaian SPM bidang sosial		100	100	100	persen	mendasar pada Permendagri no 59 tahun 2021 dan Pemensos no. 9 tahun 2018, bahwa pemerintah memberikan dan

No	Indikator kinerja utama/individu	Keterkaitan dengan komponen perencanaan program/ kegiatan	Target tahun n-1	Realisasi tahun n-1	Target tahun n	satuan	Analisis/ dasar penetapan
							menjamin hsetiap warga negara menerima pelayanan dasar secara merata, adil dan layak bidang sosial
5	Nilai evaluasi AKIP Dinas Sosia		81,90	78,35	81,95	nilai	Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya Dinas Sosial untuk mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja dengan harapan kepercayaan publik semakin meningkat
6	persentase pihak-pihak yang berperan serta dalam pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosia dan restorasi sosial		30	80	85		semakin meningkatnya masyarakat atau lembaga yang berperan dalam pelestarian nilai sosial
7	persentase realisasi anggaran pada Dinas Sosial		96	93,99	97		Anggaran adalah rencana keuangan yang disusun secara sistematis, berisi estimasi pendapatan dan belanja untuk periode tertentu (biasanya satu tahun), yang digunakan sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban keuangan oleh individu, organisasi, atau pemerintah.
8	persentase penyelesaian penugasan direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan		100	100	100	persen	jumlah penugasan yang telah diselesaikan tepat waktu (sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh pimpinan) terhadap jumlah total penugasan yang

No	Indikator kinerja utama/individu	Keterkaitan dengan komponen perencanaan program/ kegiatan	Target tahun n-1	Realisasi tahun n-1	Target tahun n	satuan	Analisis/ dasar penetapan
							diterima dalam periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase (%).

b. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG Nomor: 000.8.6.3/750/415.20/2025 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : AGUNG HARIADI, ST., MM Jabatan : Kepala Dinas Sosial Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : WARSUBI, SH., M.Si Jabatan : Bupati Jombang Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jombang, 26 September 2025 Pihak Pertama Kepala Dinas Sosial Dilandatangani secara elektronik Pihak Kedua Bupati Jombang Dilandatangani secara elektronik  WARSUBI, SH., M.Si  AGUNG HARIADI, ST., MM NIP. 197011262002121008	PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>SASARAN</th><th>INDIKATOR KINERJA</th><th>TARGET</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr> <tr> <td>1.</td><td>Meningkatnya kesejahteraan sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial</td><td>Persentase penurunan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial</td><td>1,2 persen</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Meningkatnya akses terhadap layanan sosial</td><td>Persentase capaian SIPM bidang sosial</td><td>100 persen</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Indeks pemenuhan kebutuhan dasar</td><td>60,82 indeks</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Indeks peranan sosial</td><td>76,31 indeks</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Terwujudnya tata Kelola birokrasi yang bersih dan efektif</td><td>Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah</td><td>75,65 nilai</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAM</th><th>ANGGARAN</th><th>KETERANGAN</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(5)</td><td>(6)</td><td>(7)</td></tr> <tr> <td>1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</td><td>5.460.560.689</td><td>APBD Kabupaten</td></tr> <tr> <td>2. Program Pemberdayaan Sosial</td><td>1.352.174.025</td><td>APBD Kabupaten</td></tr> <tr> <td>3. Program Rehabilitasi Sosial</td><td>1.894.762.350</td><td>APBD Kabupaten</td></tr> <tr> <td>4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</td><td>28.377.436.188</td><td>APBD Kabupaten, DBHCHT</td></tr> <tr> <td>5. Program Penanganan Bencana</td><td>741.555.100</td><td>APBD Kabupaten</td></tr> <tr> <td>6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</td><td>154.308.161</td><td>APBD Kabupaten</td></tr> </tbody> </table> Jombang, 26 September 2025 Pihak Kedua Bupati Jombang Dilandatangani secara elektronik Jombang, 26 September 2025 Pihak Pertama Kepala Dinas Sosial Dilandatangani secara elektronik  WARSUBI, SH., M.Si  AGUNG HARIADI, ST., MM NIP. 197011262002121008	NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	(1)	(2)	(3)	(4)	1.	Meningkatnya kesejahteraan sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase penurunan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	1,2 persen	2.	Meningkatnya akses terhadap layanan sosial	Persentase capaian SIPM bidang sosial	100 persen			Indeks pemenuhan kebutuhan dasar	60,82 indeks			Indeks peranan sosial	76,31 indeks	3.	Terwujudnya tata Kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	75,65 nilai	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN	(5)	(6)	(7)	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.460.560.689	APBD Kabupaten	2. Program Pemberdayaan Sosial	1.352.174.025	APBD Kabupaten	3. Program Rehabilitasi Sosial	1.894.762.350	APBD Kabupaten	4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	28.377.436.188	APBD Kabupaten, DBHCHT	5. Program Penanganan Bencana	741.555.100	APBD Kabupaten	6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	154.308.161	APBD Kabupaten
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET																																																		
(1)	(2)	(3)	(4)																																																		
1.	Meningkatnya kesejahteraan sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase penurunan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	1,2 persen																																																		
2.	Meningkatnya akses terhadap layanan sosial	Persentase capaian SIPM bidang sosial	100 persen																																																		
		Indeks pemenuhan kebutuhan dasar	60,82 indeks																																																		
		Indeks peranan sosial	76,31 indeks																																																		
3.	Terwujudnya tata Kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	75,65 nilai																																																		
PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN																																																			
(5)	(6)	(7)																																																			
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.460.560.689	APBD Kabupaten																																																			
2. Program Pemberdayaan Sosial	1.352.174.025	APBD Kabupaten																																																			
3. Program Rehabilitasi Sosial	1.894.762.350	APBD Kabupaten																																																			
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	28.377.436.188	APBD Kabupaten, DBHCHT																																																			
5. Program Penanganan Bencana	741.555.100	APBD Kabupaten																																																			
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	154.308.161	APBD Kabupaten																																																			

Penyusunan perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Jombang dilakukan sebagai tindak lanjut penetapan renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perangkat daerah agar selaras dengan arah kebijakan jangka menengah yang baru.

Penyesuaian tersebut berdampak pada perubahan tujuan dan sasaran perangkat daerah, yang semula lebih berorientasi pada capaian program dan kegiatan, menjadi lebih terfokus pada hasil dan dampak penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal ini tercermin dari penajaman sasaran kinerja yang menekankan pada peningkatan akses dan kualitas layanan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta penguatan peranan sosial pemerintah daerah.

2.3 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n+1



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG
NOMOR: 000.8.6.3/19/415.20/2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUNG HARIADI, ST., MM
Jabatan : Kepala Dinas Sosial
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WARSUBI, SH., M.Si
Jabatan : Bupati Jombang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 15 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik



WARSUBI, SH., M.Si

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Sosial
Ditandatangani secara elektronik



AGUNG HARIADI, ST., MM
NIP. 197011262002121006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kesejahteraan sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase penurunan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	1,20 persen
2.	Meningkatnya akses terhadap layanan sosial	Persentase capaian SPM bidang sosial	100 persen
		Indeks pemenuhan kebutuhan dasar	60,83 indeks
		Indeks peranan sosial	76,32 indeks
3.	Terwujudnya tata Kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	79,2 nilai

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(5)	(6)	(7)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.728.452.605	APBD Kabupaten
2. Program Pemberdayaan Sosial	1.175.469.960	APBD Kabupaten
3. Program Rehabilitasi Sosial	1.721.096.616	APBD Kabupaten
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	16.696.350.718	APBD Kabupaten, DBHCHT
5. Program Penanganan Bencana	452.233.982	APBD Kabupaten
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	66.550.350	APBD Kabupaten

Jombang, 15 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik



WARSUBI, SH., M.Si

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Sosial
Ditandatangani secara elektronik



AGUNG HARIADI, ST., MM
NIP. 197011262002121006

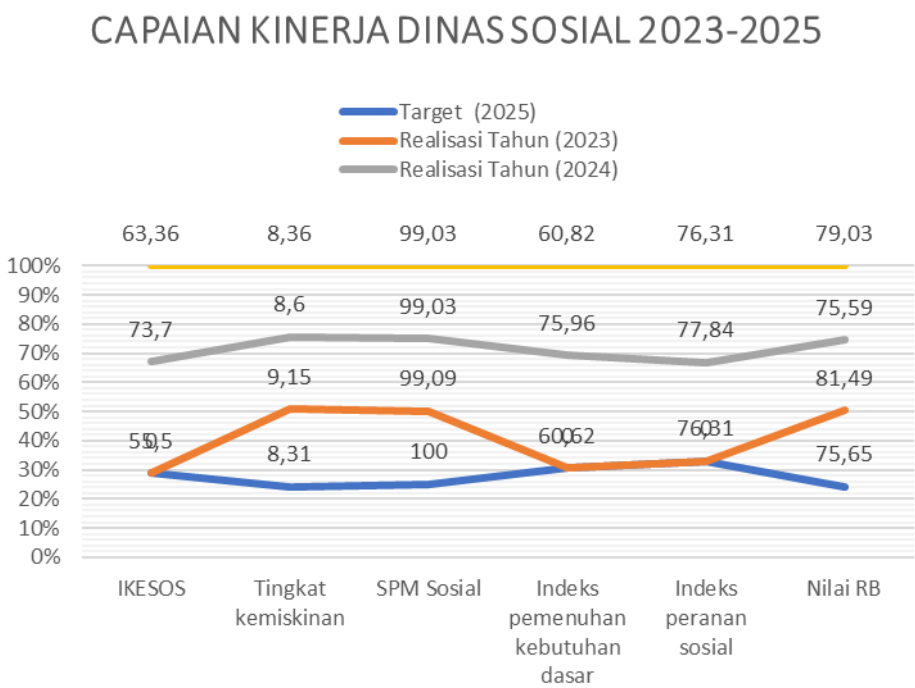
BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 Capaian kinerja organisasi dari tahun ke tahun

Capaian kinerja organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jombang mulai tahun 2023-2025, seperti pada gambar berikut:



Berdasarkan grafik capaian kinerja Dinas Sosial tahun 2023–2025, terlihat adanya tren peningkatan pada sebagian besar indikator, meskipun belum seluruhnya konsisten mencapai target tahun 2025. Indikator IKESOS menunjukkan peningkatan signifikan dari 55,5 (2023) menjadi 73,7 (2024) dan melampaui target 63,36 pada 2025, yang mencerminkan perbaikan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat. Tingkat kemiskinan juga menunjukkan tren penurunan dari 9,15 (2023) menjadi 8,6 (2024) dengan target 8,36 pada 2025, sejalan dengan arah kebijakan pengurangan kemiskinan. SPM Sosial relatif stabil dan tinggi (sekitar 99), bahkan mendekati target 100, yang menunjukkan kualitas pelayanan minimal bidang sosial sudah berjalan optimal. Namun, Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Indeks Peranan Sosial masih berfluktuasi dan belum sepenuhnya stabil, sedangkan Nilai RB menunjukkan perbaikan yang cukup baik menuju target.

Dari capaian tersebut, outcome yang dihasilkan adalah meningkatnya akses dan kualitas pelayanan sosial bagi PPKS, membaiknya kondisi kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan IKESOS dan penurunan tingkat kemiskinan, serta semakin baiknya tata kelola birokrasi di lingkungan Dinas Sosial. Selain itu, tingginya capaian SPM menunjukkan bahwa standar pelayanan dasar telah terpenuhi, yang berdampak pada meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan sosial.

3.1.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Indeks Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (pasal 1 UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial)

Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kondisi kesejahteraan sosial masyarakat yang dilihat dari keterpen,uhan kebutuhan dasar, keberfungsian sosial, serta dukungan lingkungan sosial.

Formulasi:

TAHAPAN PENGOLAHAN DATA



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

6
IKESOS Kabupaten/Kota

Nilai IKESOS Kabupaten/Kota dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari Nilai Dimensi. Nilai Penimbang atau Bobot dihitung berdasarkan Analytical Hierarchy Process (AHP).

$$\text{IKESOS}_{\text{Kabupaten/Kota}} = \sum_{i=1}^3 \text{Dimensi}_i \times \text{Bobot}_{\text{Dimensi}_i} = (\text{Dimensi}_1 \times \text{Bobot}_{\text{Dimensi}_1}) + (\text{Dimensi}_2 \times \text{Bobot}_{\text{Dimensi}_2}) + (\text{Dimensi}_3 \times \text{Bobot}_{\text{Dimensi}_3})$$

7
IKESOS Provinsi

Nilai IKESOS Provinsi dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari Nilai IKESOS Kabupaten/Kota.

$$\text{IKESOS}_{\text{Provinsi}} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{IKESOS}_{\text{Kabupaten/Kota}}}{n} = \frac{\text{IKESOS}_{\text{Kabupaten/Kota 1}} + \text{IKESOS}_{\text{Kabupaten/Kota 2}} + \dots + \text{IKESOS}_{\text{Kabupaten/Kota n}}}{n}$$

di mana n merupakan banyak Kabupaten/Kota

8
IKESOS Nasional

Nilai IKESOS Nasional dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari Nilai IKESOS Provinsi.

$$\text{IKESOS}_{\text{Nasional}} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{IKESOS}_{\text{Provinsi}}}{n} = \frac{\text{IKESOS}_{\text{Provinsi 1}} + \text{IKESOS}_{\text{Provinsi 2}} + \dots + \text{IKESOS}_{\text{Provinsi n}}}{n}$$

di mana n merupakan banyak Provinsi

3

Indikator

Nilai Indikator dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari Nilai Konversi Item.

$$\text{Indikator} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Konversi Item}_i}{n} = \frac{\text{Konversi Item}_1 + \text{Konversi Item}_2 + \dots + \text{Konversi Item}_n}{n}$$

di mana n merupakan banyak Konversi Item.

4

Variabel

Nilai Variabel dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari Nilai Indikator.

$$\text{Variabel} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Indikator}_i}{n} = \frac{\text{Indikator}_1 + \text{Indikator}_2 + \dots + \text{Indikator}_n}{n}$$

di mana n merupakan banyak Indikator

5

Dimensi

Nilai Dimensi dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari Nilai Variabel.

$$\text{Dimensi} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Variabel}_i}{n} = \frac{\text{Variabel}_1 + \text{Variabel}_2 + \dots + \text{Variabel}_n}{n}$$

di mana n merupakan banyak Variabel

SASARAN CAKUPAN DAN
BATASAN KELOMPOK SASARAN
DALAM IKESOS



LANSIA
individu yang berusia 65+



DISABILITAS
Penyandang disabilitas memenuhi kriteria kecacatan, ketelantaran, keterpencilan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, dan korban diskriminasi



PENDUDUK
Seluruh Lapisan Masyarakat (Keseluruhan Penduduk)

Tujuan RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
Terciptanya SDM yang berkualitas, berbudi luhur, religius dan berbudaya global	Indeks kesejahteraan sosial	55,5 indeks	63,36 indeks	114,16%

Berdasarkan tabel Tujuan RPJMD, Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk mengukur pencapaian tujuan “Terciptanya SDM yang berkualitas, berbudi luhur, religius dan berbudaya global.” Target tahun berjalan ditetapkan sebesar 55,5 indeks, sedangkan realisasi mencapai 63,36 indeks dengan persentase capaian sebesar 114,16%. Capaian ini menunjukkan bahwa

29

kinerja Pemerintah Kabupaten Jombang dalam pembangunan kesejahteraan sosial telah melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan, dengan selisih sebesar 7,86 poin di atas target. Capaian ini mengindikasikan efektivitas pelaksanaan program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan sosial. Keberhasilan ini juga mencerminkan konsistensi kebijakan daerah dalam memperkuat akses layanan dasar, memperluas jaminan sosial, serta mendorong partisipasi sosial dan ekonomi masyarakat

Secara substantif, capaian 63,36 menempatkan IKESOS pada kategori inklusif, yang berarti kondisi kesejahteraan sosial masyarakat telah berada pada tingkat yang relatif baik. Pemenuhan kebutuhan dasar, tingkat partisipasi sosial, serta keberdayaan ekonomi menunjukkan perkembangan yang mendukung terbentuknya SDM yang lebih berkualitas. Hal ini selaras dengan arah kebijakan RPJMD yang menempatkan pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial sebagai fondasi utama peningkatan daya saing daerah.

Persentase capaian sebesar 114,16% mengindikasikan efektivitas pelaksanaan program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kinerja ini juga mencerminkan adanya sinergi lintas perangkat daerah dalam peningkatan akses layanan dasar, perluasan jaminan sosial, dan penguatan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, indikator kesejahteraan sosial mampu berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan strategis RPJMD

Namun demikian, meskipun target telah terlampaui, capaian yang masih berada pada rentang bawah kategori inklusif menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM belum sepenuhnya optimal. Tantangan masih terdapat pada aspek keberdayaan ekonomi dan pengurangan ketimpangan sosial yang menjadi faktor penentu peningkatan indeks secara berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya ke depan perlu difokuskan pada penguatan ekonomi produktif masyarakat, pengarusutamaan kebijakan inklusif bagi kelompok rentan, serta stabilisasi capaian agar

tren peningkatan kesejahteraan sosial tetap terjaga dan mampu mendukung terwujudnya SDM yang berkualitas secara berkelanjutan.

b. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Data uang digunakan adalah data Badan Pusat Statistik yang diterbitkan setiap tahun pada bulan September.

Formulasi:

Rumus Utama (Persentase Penduduk Miskin - P_0):

$$\text{Tingkat Kemiskinan } (P_0) = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Total Populasi}} \right) \times 100\%$$

Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Daerah	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat kemiskinan	8,31-8,46 persen	8,36 persen	99,40

- Berdasarkan data BPS Kabupaten Jombang dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang pada tahun 2025 sebesar 8,36 persen dari target 8,31 – 8,46 persen sehingga capaiannya sebesar 100 persen, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 107,82 ribu orang.
- Berdasarkan tabel tersebut, sasaran strategis **meningkatnya kesejahteraan masyarakat** diukur melalui indikator kinerja daerah berupa **tingkat kemiskinan** dengan target tahun 2025 berada pada rentang **8,31–8,46 persen**. Realisasi yang dicapai pada tahun 2025 sebesar **8,36 persen**, sehingga masih berada dalam rentang target yang telah ditetapkan. Jika dihitung berdasarkan perbandingan antara target terendah dan realisasi, maka persentase capaian kinerja mencapai sekitar **99,40 persen**. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja penurunan tingkat kemiskinan telah berjalan cukup baik dan mendekati target yang direncanakan. Kondisi tersebut

mengindikasikan bahwa berbagai program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Tujuan PD : Meningkatnya kesejahteraan sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial

Tujuan PD	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kesejahteraan sosial pemerlu pelayanan sosial	Persentase penurunan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	1,2 persen	1,19	100,83

Capaian kinerja pada tujuan “meningkatnya kesejahteraan sosial pemerlu pelayanan sosial” menunjukkan hasil yang sangat baik, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Indikator persentase penurunan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ditargetkan sebesar 1,2 persen, dan berhasil direalisasikan sebesar 1,19 persen, dengan tingkat capaian mencapai 100,83 persen. Hal ini menunjukkan bahwa upaya intervensi sosial yang dilakukan telah berjalan efektif dalam menurunkan jumlah PPKS, baik melalui program rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, maupun pemberdayaan sosial. Meskipun selisih antara target dan realisasi relatif kecil, capaian yang melebihi 100 persen mengindikasikan adanya optimalisasi pelaksanaan program serta sinergi lintas sektor yang cukup baik. Ke depan, diperlukan upaya mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas intervensi dengan memastikan ketepatan sasaran, keberlanjutan program, serta penguatan basis data agar penurunan PPKS dapat lebih signifikan dan berkelanjutan.

Hambatan:

Dalam pencapaian indikator persentase penurunan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang telah melampaui target, masih terdapat beberapa hambatan yang perlu menjadi perhatian. Salah satu kendala utama adalah belum optimalnya validitas dan pemutakhiran data PPKS, sehingga berpotensi mempengaruhi ketepatan sasaran intervensi. Selain itu, jangkauan layanan sosial di beberapa wilayah masih terbatas, terutama pada

daerah dengan akses yang sulit. Keterbatasan sumber daya manusia pelaksana program serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Di sisi lain, keterbatasan anggaran serta masih adanya ketergantungan sebagian PPKS terhadap bantuan sosial turut mempengaruhi efektivitas program secara berkelanjutan

Upaya tindak lanjut:

Sebagai tindak lanjut, Dinas Sosial telah dan akan melakukan berbagai upaya strategis, antara lain melalui pemutakhiran data secara berkala melalui verifikasi dan validasi terpadu, serta penguatan integrasi data dengan DTKS/DTSEN guna meningkatkan akurasi sasaran. Perluasan jangkauan layanan dilakukan dengan pendekatan jemput bola dan optimalisasi peran pendamping sosial di lapangan. Dalam rangka mengatasi keterbatasan SDM, dilakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan bimbingan teknis, serta pengusulan penambahan personel. Koordinasi lintas sektor juga diperkuat melalui forum koordinasi rutin dengan OPD terkait, pemerintah desa, dan lembaga sosial. Selain itu, dilakukan optimalisasi sumber pendanaan alternatif seperti CSR dan kemitraan dengan berbagai pihak. Untuk mengurangi ketergantungan bantuan, dikembangkan program pemberdayaan sosial dan peningkatan kemandirian ekonomi PPKS

d. Sasaran PD 1 : Meningkatnya akses terhadap layanan sosial

Indikator 1 : Persentase Capaian SPM Bidang Sosial

Standar pelayanan minimal (SPM) adalah adalah ketentuan jenis dan mutu layanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap penyandang masalah kesejahteraan secara minimal.

Jenis layanan dasar pada SPM bidang sosial kabupaten/kota, yaitu:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial

5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota

Penghitungan indeks pencapaian SPM (IP SPM) yaitu:

Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan PP No. 2 Tahun 2018. IP SPM meliputi:

- a. Capaian mutu pelayanan dasar merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub indikator kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan SDM sesuai dengan standar teknis
- b. Capaian penerima pelayanan dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui target dan indikator kinerja

Formulasi:

IP SPM =

(% pencapaian mutu minimal layanan dasar x BM) + (% pencapaian penerima layanan dasar x BP)

% indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar:

Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub indikator kinerja pencapaian minimal barang, jasa dan SDM sesuai dengan standar teknis

% indeks pencapaian penerima layanan dasar dalam mencapai target SPM di daerah

BM : bobot mutu minimal layanan dasar sebesar 20%

BP : bobot penerima layanan dasar sebesar 80%

Sasaran PD	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya akses terhadap layanan sosial	Persentase capaian SPM bidang sosial	100 persen	99,03	99,03

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial pada beberapa kelompok sasaran menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan sebagian besar indikator mendekati bahkan mencapai target 100 persen. Layanan bagi penyandang disabilitas dan perlindungan serta jaminan sosial bagi korban bencana telah mencapai 100 persen, yang mengindikasikan bahwa intervensi pada kedua kelompok tersebut telah berjalan optimal dan sesuai standar. Sementara itu, capaian pada kelompok anak (98,33%), lanjut usia

(98,46%), serta gelandangan dan pengemis di luar panti (98,33%) juga menunjukkan hasil yang sangat tinggi, meskipun masih terdapat sedikit kesenjangan terhadap target. Selisih capaian ini mengindikasikan bahwa masih terdapat sebagian kecil sasaran yang belum sepenuhnya terlayani, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor jangkauan layanan, dinamika data sasaran, serta keterbatasan sumber daya. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan kinerja yang efektif dalam penyelenggaraan pelayanan sosial, namun tetap memerlukan upaya perbaikan berkelanjutan untuk memastikan seluruh sasaran terpenuhi secara menyeluruh.

Hambatan:

Meskipun capaian SPM bidang sosial pada sebagian besar indikator telah mendekati atau mencapai target, masih terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi belum optimalnya capaian secara keseluruhan, khususnya pada kelompok anak, lanjut usia, serta gelandangan dan pengemis di luar panti. Hambatan tersebut antara lain dinamika data sasaran yang cepat berubah, keterbatasan jangkauan layanan pada kelompok rentan tertentu, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Selain itu, koordinasi lintas sektor dalam penanganan kelompok rentan tertentu masih perlu diperkuat.

Upaya tindak lanjut:

Sebagai tindak lanjut, dilakukan berbagai upaya strategis antara lain melalui pemutakhiran data secara berkala, peningkatan layanan jemput bola dan penjangkauan aktif, serta penguatan kapasitas SDM pelayanan sosial. Koordinasi lintas sektor juga ditingkatkan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Selain itu, dikembangkan program pemberdayaan untuk mengurangi ketergantungan bantuan serta peningkatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan seluruh indikator SPM dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Indikator 2 : Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Indeks kebutuhan dasar adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keterpenuhan kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial

(PPKS) maupun masyarakat rentan, yang didukung oleh 7 variabel dan 18 indikator.



Sasaran PD	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya akses terhadap layanan sosial	Indeks pemenuhan kebutuhan dasar	60,62 indeks	60,82 indeks	100

Capaian kinerja pada sasaran “meningkatnya akses terhadap layanan sosial” yang diukur melalui indikator indeks pemenuhan kebutuhan dasar menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan sebesar 60,62 indeks berhasil direalisasikan sebesar 60,82 indeks, dengan tingkat capaian 100 persen. Indeks pemenuhan kebutuhan dasar merupakan salah satu dimensi penting dalam Indeks Kesejahteraan Sosial yang mencerminkan tingkat terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, sandang, papan, serta akses terhadap layanan dasar. Dengan demikian, capaian ini tidak hanya menggambarkan keberhasilan program pada level indikator, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Hasil ini mengindikasikan bahwa intervensi pemerintah daerah dalam bentuk bantuan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta program pemberdayaan telah berjalan efektif. Meskipun demikian, capaian ini tetap perlu dijaga keberlanjutannya dengan memastikan ketepatan sasaran, pemerataan akses, dan peningkatan kualitas layanan

Hambatan:

Meskipun capaian indeks pemenuhan kebutuhan dasar telah melampaui target, masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diperhatikan untuk menjaga keberlanjutan kinerja. Hambatan tersebut antara lain terkait dengan validitas data penerima manfaat yang belum sepenuhnya akurat, ketimpangan akses layanan antar wilayah, serta keterbatasan anggaran dalam menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat secara optimal. Selain itu, masih terdapat kecenderungan ketergantungan sebagian masyarakat terhadap bantuan sosial serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan sistem monitoring evaluasi.

Upaya tindak lanjut:

Sebagai tindak lanjut, dilakukan langkah-langkah strategis berupa pemutakhiran data secara berkala melalui verifikasi dan validasi, peningkatan pemerataan layanan melalui pendekatan jemput bola, serta penguatan kemitraan untuk mendukung pembiayaan program. Selain itu, dikembangkan program pemberdayaan guna meningkatkan kemandirian masyarakat, serta diperkuat koordinasi lintas sektor dan sistem monitoring evaluasi berbasis data. Upaya ini diharapkan dapat menjaga bahkan meningkatkan capaian indeks secara berkelanjutan serta memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang lebih merata, yang pada akhirnya mendukung peningkatan Indeks Kesejahteraan Sosial secara keseluruhan.

Indikator 3 : Indeks Peranan Sosial

Indeks peranan sosial adalah ukuran nilai kapasitas individu sasaran rehabilitasi sosial dalam berpartisipasi secara bermakna, yang mencerminkan kohesi dan dukungan kelembagaan inklusif untuk memperkuat keberfungsian sosial.



Sasaran PD	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya akses terhadap layanan sosial	Indeks peranan sosial	76,31 indeks	76,31 indeks	100

Capaian kinerja pada indikator indeks peranan sosial sebesar 76,31 indeks dengan tingkat capaian 100 persen menunjukkan bahwa keberfungsian sosial masyarakat telah berjalan optimal sesuai target. Indeks peranan sosial sebagai salah satu dimensi dalam Indeks Kesejahteraan Sosial didukung oleh berbagai variabel penting seperti partisipasi kelompok rentan dalam forum perencanaan pembangunan (Musrenbang), keterlibatan dalam pengambilan keputusan, keberadaan organisasi sosial, serta tingkat kohesi sosial di masyarakat. Data pendukung menunjukkan bahwa pengukuran indeks ini mencakup keterwakilan kelompok rentan (anak, perempuan, lansia, dan disabilitas) dalam forum Musrenbang, baik dari sisi keikutsertaan maupun pemberian masukan, serta keberadaan organisasi sosial dan keterlibatan dalam struktur formal seperti DPRD . Selain itu, aspek kohesi sosial juga diukur melalui partisipasi kelompok rentan dalam organisasi masyarakat serta rendahnya tingkat konflik sosial seperti kekerasan atau bullying. Dengan terpenuhinya indikator-indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran sosial masyarakat, khususnya kelompok rentan, telah terfasilitasi dengan baik sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah. Namun demikian, kualitas partisipasi dan keberlanjutan keterlibatan masyarakat masih perlu terus ditingkatkan.

Hambatan:

Meskipun capaian indeks peranan sosial telah mencapai target, masih terdapat beberapa hambatan dalam implementasinya. Hambatan tersebut antara lain belum meratanya partisipasi kelompok rentan di seluruh wilayah, kualitas partisipasi yang masih cenderung formalitas, serta keterbatasan data dukung yang terintegrasi. Selain itu, masih adanya stigma sosial dan belum optimalnya kelembagaan sosial juga mempengaruhi keberfungsian sosial masyarakat.

Upaya tindak lanjut

Sebagai tindak lanjut, dilakukan berbagai upaya strategis antara lain peningkatan fasilitasi partisipasi kelompok rentan dalam forum perencanaan pembangunan hingga tingkat desa, peningkatan kapasitas kelompok rentan agar dapat berpartisipasi secara substantif, serta pengembangan sistem data yang terintegrasi. Selain itu, dilakukan edukasi publik untuk mendorong inklusi sosial, penguatan kelembagaan sosial, serta peningkatan sistem monitoring dan evaluasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan peranan sosial masyarakat dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan daerah

e. Sasaran PD 2 : Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif

Indikator 1 : Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah

Sasaran PD	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Terwujudnya tata Kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	75,65 nilai	79,03 nilai	104,47

Capaian kinerja pada sasaran “terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif” menunjukkan hasil yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Indikator nilai reformasi birokrasi perangkat daerah ditargetkan sebesar 75,65 dan berhasil direalisasikan sebesar 79,03, dengan tingkat capaian mencapai 104,47 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah telah berjalan efektif, ditandai dengan peningkatan kualitas tata kelola, akuntabilitas kinerja, serta pelayanan publik. Peningkatan nilai ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek manajemen perubahan, penataan organisasi, penataan tata laksana, sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Meskipun capaian telah melampaui target, tetap diperlukan upaya konsistensi dan inovasi berkelanjutan untuk

menjaga kualitas reformasi birokrasi agar tetap adaptif terhadap tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Hambatan:

Meskipun capaian reformasi birokrasi telah melampaui target, masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diperhatikan untuk menjaga keberlanjutan kinerja. Hambatan tersebut antara lain belum meratanya pemahaman reformasi birokrasi di seluruh unit kerja, kualitas implementasi pada beberapa area perubahan yang belum optimal, serta keterbatasan SDM yang kompeten. Selain itu, integrasi sistem kinerja dan perencanaan yang belum sepenuhnya selaras serta sistem monitoring evaluasi yang belum optimal juga menjadi tantangan.

Upaya tindak lanjut:

Sebagai tindak lanjut, dilakukan langkah-langkah strategis berupa penguatan sosialisasi dan internalisasi reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan, serta penguatan integrasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja. Selain itu, dilakukan pengembangan sistem monitoring evaluasi berbasis digital serta mendorong perubahan budaya kerja yang adaptif dan berorientasi hasil. Dengan upaya tersebut, diharapkan capaian reformasi birokrasi dapat terus ditingkatkan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan public

3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 tahun (dua) tahun terakhir

a. Indeks Kesejahteraan Sosial

Tujuan RPJMD	Indikator	Target tahun n (2025)	Realisasi		
			Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)
Terciptanya SDM yang berkualitas, berbudi luhur, religius dan berbudaya global	Indeks kesejahteraan sosial	55,5 indeks	0	73,7 indeks	63,36 indeks

Berdasarkan tabel sasaran strategis dan capaian indikator kinerja utama, Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) sebagai indikator untuk mendukung sasaran “Terciptanya SDM yang berkualitas, berbudi luhur, religius dan berbudaya global” menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023 (n-2) belum terdapat nilai capaian (0), yang mengindikasikan bahwa pengukuran atau integrasi IKESOS sebagai indikator kinerja belum dilaksanakan atau belum terdokumentasi secara resmi. Pada tahun 2024 (n-1), capaian melonjak menjadi 73,7 dan berada pada kategori inklusif tinggi, menunjukkan kondisi kesejahteraan sosial yang relatif kuat pada periode tersebut. Namun pada tahun 2025, capaian tercatat sebesar 63,36, masih dalam kategori inklusif tetapi mengalami penurunan sebesar 10,34 poin dibanding tahun sebelumnya.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 55,5 indeks, capaian 63,36 menunjukkan kinerja yang melampaui target sebesar 7,86 poin atau sekitar 14,16% di atas target yang ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa secara perencanaan, kinerja daerah dalam bidang kesejahteraan sosial telah memenuhi bahkan melampaui ekspektasi yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Namun demikian, penurunan dari capaian tahun 2024 perlu menjadi perhatian analitis, karena menunjukkan adanya perlambatan atau normalisasi indeks setelah capaian yang relatif tinggi pada tahun sebelumnya.

Secara substantif, penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain penyesuaian metodologi penghitungan, perubahan basis data, dinamika ekonomi makro, maupun peningkatan sensitivitas indikator terhadap kelompok rentan. Mengingat IKESOS merupakan indeks komposit yang sangat dipengaruhi oleh dimensi keberdayaan ekonomi dan ketimpangan sosial, fluktuasi ekonomi, perubahan tingkat kemiskinan, atau peningkatan jumlah kelompok rentan dapat berdampak langsung pada skor indeks.

Dari perspektif pencapaian sasaran strategis, nilai 63,36 tetap mencerminkan bahwa kualitas kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Jombang berada pada fase inklusif, yang berarti pemenuhan kebutuhan dasar, partisipasi sosial, serta keberdayaan ekonomi telah berkembang secara relatif baik. Namun demikian, untuk menjaga

konsistensi peningkatan kualitas SDM sebagaimana dirumuskan dalam sasaran strategis daerah, diperlukan upaya stabilisasi dan penguatan pada dimensi yang paling sensitif terhadap penurunan, khususnya keberdayaan ekonomi dan pengurangan ketimpangan.

Meskipun target kinerja telah terlampaui, analisis tren menunjukkan perlunya langkah korektif dan penguatan kebijakan agar capaian IKESOS tidak hanya memenuhi target tahunan, tetapi juga menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan dan selaras dengan visi pembangunan daerah

b. Tingkat Kemiskinan

Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Daerah	Target tahun n (2025)	Realisasi		
			Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat kemiskinan	8,31–8,46 persen	9,15 indeks	8,6 indeks	8,36 indeks

- a. Selama periode Maret 2024-Maret 2025. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jombang turun sebanyak 2,75 ribu jiwa, dari 110,57 ribu jiwa pada maret 2024 menjadi 107,82 ribu jiwa pada Maret 2025 atau mengalami penurunan sebesar 2,49 persen. Semen tara itu, persentase penduduk miskin di Kabupaten Jombang dalam rentang waktu satu tahun mengalami penurunan sebesar 0,24 poin dari 8,60 persen pada Maret 2024 menjadi 8,36 persen pada Maret 2025.
- b. Tingkat kemiskinan Kabupaten Jombang pada tahun 2023 tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang sebesar 9,15 persen atau jumlah penduduk miskin sebesar 117.360 orang, dan mengalami penurunan menjadi 8,60 persen pada bulan maret 2024 dengan jumlah penduduk miskin mencapai 110,57 ribu jiwa, dan Kembali menurun menjadi 8,36 persen pada bulan maret 2025 dengan jumlah penduduk miskin mencapai 107,82 ribu iiwa. Capaian tahun 2025 tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan, yaitu berada pada rentang 8,31-8,46 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan mas yarakat serta efektivitas

program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Bersama para pemangku kepentingan.

c. Tujuan PD : Meningkatnya kesejahteraan sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial

Tujuan PD	Indikator	Target tahun n (2025)	Realisasi		
			Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)
Meningkatnya kesejahteraan sosial pemerlu pelayanan sosial	Persentase penurunan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	1,2 persen	0	0	1,19

Capaian kinerja pada tujuan “meningkatnya kesejahteraan sosial pemerlu pelayanan sosial” yang diukur melalui indikator persentase penurunan PPKS menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada tahun 2025. Pada tahun 2023 dan 2024 tidak terdapat penurunan (0 persen), yang mengindikasikan bahwa intervensi program belum memberikan dampak yang terukur atau belum optimal dalam menurunkan jumlah PPKS. Namun pada tahun 2025 terjadi peningkatan capaian yang cukup signifikan dengan realisasi sebesar 1,19 persen dari target 1,2 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025 telah terjadi perbaikan strategi pelaksanaan program, baik dari sisi ketepatan sasaran, intensitas intervensi, maupun sinergi program yang lebih efektif. Meskipun capaian sudah mendekati target, adanya gap kecil sebesar 0,01 persen menunjukkan masih terdapat ruang perbaikan, serta pentingnya menjaga konsistensi kinerja agar penurunan PPKS dapat berlangsung secara berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya.

Upaya tindak lanjut:

Upaya tindak lanjut difokuskan pada penguatan keberlanjutan program penurunan PPKS dengan mempertahankan strategi yang telah efektif pada tahun 2025 serta melakukan penyempurnaan pada aspek yang masih belum optimal. Langkah yang dilakukan antara lain melalui pemutakhiran data PPKS secara berkala untuk memastikan ketepatan

sasaran intervensi, peningkatan intensitas program rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan. Selain itu, dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor dengan OPD terkait, pemerintah desa, dan stakeholder lainnya agar intervensi lebih terpadu. Pendekatan jemput bola dan pendampingan sosial juga ditingkatkan untuk menjangkau kelompok yang belum terlayani. Di samping itu, dilakukan penguatan monitoring dan evaluasi berbasis data guna memastikan efektivitas program, sehingga penurunan PPKS dapat terus ditingkatkan dan mencapai target secara optimal dan berkelanjutan.

d. Sasaran PD : Meningkatnya akses terhadap layanan sosial

Indikator 1 : Persentase Capaian SPM Bidang Sosial

Sasaran PD	Indikator	Target tahun n (2025)	Realisasi		
			Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)
Meningkatnya akses terhadap layanan sosial	Persentase capaian SPM bidang sosial	100 persen	99,09 persen	99,03 persen	99,03 persen

Capaian kinerja pada indikator persentase capaian SPM bidang sosial dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kondisi yang relatif stabil, namun belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023 capaian sebesar 99,09 persen, tahun 2024 sebesar 99,03 persen, dan tahun 2025 tetap sebesar 99,03 persen, sementara target tahun 2025 ditetapkan sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan sosial telah berjalan sangat baik dan konsisten mendekati target maksimal, namun masih terdapat gap kecil sebesar 0,97 persen yang belum terpenuhi. Stagnasi capaian pada dua tahun terakhir mengindikasikan adanya kendala yang bersifat persisten, seperti keterbatasan jangkauan layanan, dinamika data sasaran, serta pemenuhan indikator SPM tertentu yang membutuhkan intervensi lebih spesifik. Meskipun demikian, capaian yang mendekati 100 persen mencerminkan komitmen yang kuat dalam pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial, yang perlu terus didorong agar seluruh indikator dapat terpenuhi secara optimal.

Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan capaian SPM bidang sosial difokuskan pada percepatan pemenuhan indikator yang belum mencapai target secara optimal. Langkah yang ditempuh antara lain dengan mengidentifikasi secara rinci indikator SPM yang belum terpenuhi dan menyusun rencana aksi yang lebih spesifik dan terarah. Selain itu, dilakukan peningkatan jangkauan layanan melalui pendekatan jemput bola, khususnya bagi kelompok rentan dan wilayah yang belum terlayani secara maksimal. Pemutakhiran dan validasi data sasaran juga terus diperkuat untuk memastikan ketepatan penerima manfaat. Di sisi lain, kapasitas SDM pelaksana ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan teknis, serta didukung dengan penguatan koordinasi lintas sektor bersama OPD terkait, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya. Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan sosial serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data juga menjadi prioritas, sehingga seluruh indikator SPM bidang sosial dapat tercapai secara penuh dan berkelanjutan.

Indikator 2 : Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Sasaran PD	Indikator	Target tahun n (2025)	Realisasi		
			Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)
Meningkatnya akses terhadap layanan sosial	Indeks pemenuhan kebutuhan dasar	60,62 indeks	0	75,96 indeks	60,82 indeks

Capaian kinerja pada indikator indeks pemenuhan kebutuhan dasar menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023 belum terdapat capaian (0), yang mengindikasikan kemungkinan belum dilakukannya pengukuran atau belum tersedianya data pendukung. Selanjutnya pada tahun 2024 terjadi lonjakan capaian yang cukup tinggi sebesar 75,96 indeks, melampaui target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 60,62 indeks. Namun pada tahun 2025 capaian berada pada angka 60,82 indeks, yang meskipun mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, tetap berhasil melampaui target dengan

capaian 100 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan baseline atau metode pengukuran antar tahun, atau adanya penyesuaian indikator sehingga capaian menjadi lebih realistis. Secara substansi, capaian tahun 2025 tetap mencerminkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat telah berjalan dengan baik dan sesuai target, meskipun diperlukan konsistensi dalam pengukuran agar tren kinerja lebih stabil dan dapat dibandingkan secara akurat.

Upaya tindak lanjut:

Upaya tindak lanjut difokuskan pada penguatan konsistensi pengukuran dan keberlanjutan capaian indeks pemenuhan kebutuhan dasar. Langkah yang dilakukan antara lain dengan memastikan keseragaman metode penghitungan dan penetapan baseline indikator agar data antar tahun dapat diperbandingkan secara valid. Selain itu, dilakukan penguatan sistem pengumpulan dan pemutakhiran data dari berbagai sumber seperti BPS, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya. Intervensi program pemenuhan kebutuhan dasar seperti bantuan sosial, peningkatan akses layanan kesehatan, perbaikan akses air minum layak, serta penguatan jaminan sosial juga terus ditingkatkan dan lebih diarahkan pada kelompok rentan. Di sisi lain, koordinasi lintas sektor diperkuat untuk memastikan keterpaduan program, serta dilakukan monitoring dan evaluasi berbasis data secara berkala guna menjaga stabilitas dan peningkatan capaian indeks secara berkelanjutan.

Indikator 3 : Indeks Peranan Sosial

Sasaran PD	Indikator	Target tahun n (2025)	Realisasi		
			Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)
Meningkatnya akses terhadap layanan sosial	Indeks peranan sosial	76,31 indeks	0	77,84 indeks	76,31 indeks

Capaian kinerja pada indikator indeks peranan sosial menunjukkan tren yang cukup dinamis dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023 belum terdapat capaian (0), yang mengindikasikan kemungkinan belum

dilakukan pengukuran atau belum tersedianya data pendukung. Pada tahun 2024, capaian meningkat signifikan menjadi 77,84 indeks, bahkan melampaui target tahun 2025 sebesar 76,31 indeks. Namun pada tahun 2025 capaian berada tepat pada target yaitu 76,31 indeks, yang menunjukkan adanya penyesuaian atau normalisasi nilai agar lebih sesuai dengan baseline dan metodologi pengukuran yang digunakan. Secara substansi, capaian ini menunjukkan bahwa keberfungsian sosial masyarakat, termasuk partisipasi, peran dalam pengambilan keputusan, serta keterlibatan dalam kehidupan sosial, telah berjalan dengan baik. Meskipun terjadi sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya, capaian tahun 2025 tetap mencerminkan kondisi yang stabil dan sesuai target kinerja yang ditetapkan.

Upaya tindak lanjut:

Upaya tindak lanjut difokuskan pada penguatan konsistensi pengukuran serta peningkatan kualitas peranan sosial masyarakat. Langkah yang dilakukan antara lain memastikan keseragaman metodologi penghitungan indeks agar data antar tahun dapat dibandingkan secara valid dan akurat. Selain itu, dilakukan peningkatan partisipasi kelompok rentan dalam forum perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan, serta penguatan peran organisasi sosial di masyarakat. Edukasi dan sosialisasi juga ditingkatkan untuk mendorong inklusi sosial dan mengurangi stigma terhadap kelompok rentan. Di sisi lain, penguatan sistem data dan monitoring evaluasi berbasis indikator peranan sosial terus dikembangkan, serta koordinasi lintas sektor diperkuat guna mendukung keberlanjutan program. Dengan langkah tersebut, diharapkan indeks peranan sosial dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan

e. Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif

Sasaran PD	Indikator	Target tahun n (2025)	Realisasi		
			Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)
Terwujudnya tata Kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	75,65 nilai	81,49 nilai	75,59 nilai	79,03 nilai

Berdasarkan data capaian indikator *Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah*, terlihat bahwa tren kinerja dalam periode 2023–2025 menunjukkan pola yang **fluktuatif namun tetap berada di atas target**. Pada tahun 2023 capaian sebesar **81,49**, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi **75,59**, dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi **79,03**. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar **75,65**, maka capaian tahun 2025 telah **melampaui target**. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan pada tahun 2024, secara umum kinerja reformasi birokrasi tetap berada dalam kategori baik dan mampu pulih pada tahun berikutnya.

Penurunan kinerja pada tahun 2024 dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya penyesuaian indikator atau metode penilaian reformasi birokrasi, belum optimalnya implementasi program pada seluruh unit kerja, serta kemungkinan adanya keterbatasan SDM dalam mengimplementasikan perubahan secara konsisten. Selain itu, faktor administratif seperti kelengkapan dokumen dukung dan eviden penilaian juga dapat mempengaruhi hasil evaluasi. Sementara itu, peningkatan kembali pada tahun 2025 menunjukkan adanya upaya perbaikan yang cukup efektif, seperti penguatan komitmen pimpinan, perbaikan sistem manajemen kinerja, serta peningkatan kualitas implementasi reformasi birokrasi.

Adapun faktor pendorong capaian yang relatif tinggi secara keseluruhan meliputi adanya penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang lebih baik, pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kesadaran aparatur terhadap pentingnya reformasi birokrasi. Di sisi lain, tantangan yang masih dihadapi antara lain konsistensi implementasi di seluruh unit kerja, kualitas SDM yang belum merata, serta perlunya penguatan budaya kerja yang berorientasi hasil.

Sebagai alternatif solusi yang telah dan perlu terus dilakukan, perangkat daerah melakukan penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan, serta optimalisasi pemanfaatan sistem digital seperti e-office dan e-kinerja. Selain itu, dilakukan penataan ulang proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, serta memastikan kelengkapan dokumen dan eviden penilaian sesuai

dengan indikator yang ditetapkan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tren peningkatan kinerja reformasi birokrasi dapat terus berlanjut secara konsisten dan berkelanjutan.

3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

a. Indeks Kesejahteraan Sosial

Tujuan RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Tingkat kemajuan (%)
Terciptanya SDM yang berkualitas, berbudi luhur, religius dan berbudaya global	Indeks kesejahteraan sosial	58 indeks	63,36 indeks	108,24

Berdasarkan tabel capaian Sasaran Strategis RPJMD, Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) sebagai Indikator Kinerja Daerah menunjukkan kinerja yang melampaui target akhir RPJMD. Target akhir ditetapkan sebesar 58 indeks, sementara realisasi mencapai 63,36 indeks, sehingga menghasilkan tingkat kemajuan sebesar 108,24%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan kesejahteraan sosial Kabupaten Jombang tidak hanya memenuhi, tetapi melampaui sasaran akhir yang direncanakan dalam dokumen RPJMD

Selisih capaian sebesar 5,36 poin di atas target akhir mencerminkan keberhasilan intervensi kebijakan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan peranan sosial, dan peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat. Capaian ini juga menunjukkan bahwa arah pembangunan sosial telah berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya SDM yang berkualitas, berbudi luhur, religius, dan berbudaya global sebagaimana dirumuskan dalam sasaran strategis daerah

Secara substantif, capaian 63,36 menempatkan IKESOS dalam kategori inklusif, yang berarti kesejahteraan sosial masyarakat telah berada pada tingkat yang relatif baik. Namun demikian, meskipun target akhir RPJMD telah terlampaui, posisi indeks yang masih berada pada rentang bawah kategori inklusif menunjukkan bahwa penguatan keberdayaan ekonomi dan pengurangan ketimpangan sosial tetap perlu

menjadi fokus kebijakan agar peningkatan kualitas kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan

b. Tingkat Kemiskinan

Ssaran RPJMD	Indikator Kinerja Daerah	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Tingkat kemajuan (%)
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat kemiskinan	6,98-7,60 persen	8,36 persen	24

Berdasarkan perkembangan indikator tingkat kemiskinan, realisasi tahun 2025 sebesar **8,36 persen** mengalami penurunan dibandingkan baseline tahun 2024 yang sebesar **8,60 persen**, atau turun **0,24 poin persentase**. Jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2029 yang ditetapkan pada batas atas **7,60 persen**, maka total penurunan yang harus dicapai sejak baseline 2024 adalah **1,00 poin persentase**. Dengan demikian, capaian penurunan hingga tahun 2025 telah mencapai sekitar **24 persen** dari total penurunan yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan kemiskinan telah berjalan ke arah yang positif, namun masih diperlukan penguatan intervensi program penanggulangan kemiskinan, terutama melalui peningkatan akses perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, serta sinergi lintas sektor agar target RPJMD pada akhir periode dapat tercapai secara optimal.

c. Tujuan PD : Meningkatkan kesejahteraan sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial

Tujuan PD	Indikator	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat kemajuan (%)
Meningkatnya kesejahteraan sosial pemerlu pelayanan sosial	Persentase penurunan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	1,8 persen	1,19 persen	33,88

Capaian indikator “persentase penurunan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)” menunjukkan bahwa hingga periode pengukuran, realisasi baru mencapai 1,19 persen dari target akhir Renstra sebesar 1,8 persen, atau dengan tingkat kemajuan sebesar 33,88 persen.

Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penurunan jumlah PPKS telah berjalan, namun progresnya masih relatif rendah dan belum berada pada jalur yang optimal untuk mencapai target akhir. Rendahnya tingkat kemajuan ini dapat mencerminkan bahwa intervensi program yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu menekan laju pertumbuhan maupun mempercepat pengurangan PPKS secara signifikan, terutama jika dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan sosial yang terus berkembang.

Secara substantif, kondisi ini menunjukkan bahwa outcome peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat belum sepenuhnya tercapai secara maksimal, khususnya dalam aspek pengurangan jumlah PPKS. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih terbatasnya cakupan dan ketepatan sasaran program akibat dinamika dan validitas data PPKS, keterbatasan anggaran dan sumber daya dalam menjangkau seluruh kelompok rentan, serta belum optimalnya integrasi program pemberdayaan yang berorientasi pada kemandirian. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi masyarakat, inflasi, dan kerentanan sosial juga turut mempengaruhi lambatnya penurunan PPKS.

- d. Sasaran PD : Meningkatnya akses terhadap layanan sosial
- Indikator 1 : Persentase Capaian SPM Bidang Sosial

Sasaran PD	Indikator	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat kemajuan (%)
Meningkatnya akses terhadap layanan sosial	Persentase capaian SPM bidang sosial	100 persen	99,03 persen	99,03

Capaian indikator “persentase capaian SPM bidang sosial” pada sasaran meningkatnya akses terhadap layanan sosial menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, dengan realisasi sebesar 99,03 persen dari target akhir Renstra 100 persen, atau tingkat kemajuan mencapai 99,03 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial oleh Dinas Sosial telah berjalan hampir optimal dan mampu menjangkau sebagian besar kelompok sasaran sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Tingginya capaian ini juga mencerminkan bahwa sistem

pelayanan, baik dari sisi kelembagaan, prosedur, maupun ketersediaan layanan, telah berfungsi dengan baik dalam memenuhi kebutuhan dasar PPKS.

Dari sisi outcome, capaian ini berdampak positif terhadap meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan sosial bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial secara umum. Masyarakat yang membutuhkan layanan sosial relatif telah terlayani sesuai standar, yang pada akhirnya mendukung penurunan kerentanan sosial dan peningkatan kualitas hidup. Selain itu, capaian yang mendekati target maksimal ini juga menunjukkan adanya konsistensi dalam implementasi kebijakan serta komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pelayanan dasar.

Namun demikian, masih terdapat gap sebesar 0,97 persen yang menunjukkan bahwa belum seluruh komponen SPM terpenuhi secara sempurna. Hambatan yang mungkin dihadapi antara lain keterbatasan jangkauan layanan di wilayah tertentu, kendala teknis dalam pemenuhan seluruh indikator SPM secara simultan, serta dinamika data sasaran yang terus berubah. Selain itu, faktor kualitas layanan juga perlu menjadi perhatian, karena capaian kuantitatif yang tinggi belum tentu sepenuhnya mencerminkan kualitas layanan yang optimal.

Indikator 2 : Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Sasaran PD	Indikator	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat kemajuan (%)
Meningkatnya akses terhadap layanan sosial	Indeks pemenuhan kebutuhan dasar	60,66 indeks	60,82 indeks	100,26

Capaian indikator “Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar” pada sasaran meningkatnya akses terhadap layanan sosial menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan realisasi sebesar 60,82 indeks yang melampaui target akhir Renstra sebesar 60,66 indeks, atau tingkat kemajuan mencapai 100,26 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat, khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), telah berjalan secara efektif bahkan melebihi ekspektasi yang ditetapkan. Peningkatan indeks ini mencerminkan

semakin baiknya akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, serta dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak lainnya.

Dari sisi outcome, capaian ini berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan, karena kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi secara lebih optimal. Hal ini juga menunjukkan bahwa intervensi program yang dilaksanakan, baik melalui bantuan sosial, rehabilitasi sosial, maupun pemberdayaan, telah memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi kerentanan sosial. Keberhasilan melampaui target ini sekaligus mencerminkan adanya efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, serta koordinasi program lintas sektor yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Namun demikian, meskipun capaian telah melampaui target, masih terdapat potensi hambatan yang perlu diantisipasi, seperti keberlanjutan program dalam menghadapi keterbatasan anggaran, dinamika perubahan data sasaran, serta risiko ketergantungan penerima manfaat terhadap bantuan sosial. Selain itu, capaian indeks yang tinggi perlu diimbangi dengan pemerataan kualitas layanan agar tidak terjadi kesenjangan antarwilayah atau kelompok masyarakat.

Indikator 3 : Indeks Peranan Sosial

Sasaran PD	Indikator	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat kemajuan (%)
Meningkatnya akses terhadap layanan sosial	Indeks peranan sosial	76,35 indeks	76,31 indeks	99,95

Capaian indikator “Indeks Peranan Sosial” pada sasaran meningkatnya akses terhadap layanan sosial menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, dengan realisasi sebesar 76,31 indeks dari target akhir Renstra 76,35 indeks, atau tingkat kemajuan mencapai 99,95 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa peran sosial individu maupun kelompok dalam masyarakat, termasuk partisipasi sosial, kepedulian, dan fungsi sosial komunitas, telah berkembang dengan sangat baik dan hampir

sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Kinerja ini mencerminkan bahwa berbagai program pemberdayaan sosial, penguatan kelembagaan sosial, serta intervensi berbasis komunitas telah berjalan efektif dalam meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat.

Dari sisi outcome, capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas interaksi sosial, solidaritas, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan pembangunan. Kondisi tersebut berkontribusi pada terciptanya lingkungan sosial yang lebih inklusif dan resilien, serta mendukung upaya peningkatan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Tingginya indeks peranan sosial juga mengindikasikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi mulai berperan aktif dalam proses pemberdayaan dan penanganan masalah sosial di lingkungannya.

Namun demikian, masih terdapat selisih kecil sebesar 0,04 indeks yang menunjukkan bahwa capaian belum sepenuhnya optimal. Hambatan yang mungkin dihadapi antara lain belum meratanya tingkat partisipasi sosial di seluruh wilayah, masih adanya kelompok masyarakat yang pasif atau belum terjangkau program pemberdayaan, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan sosial di tingkat lokal. Selain itu, dinamika sosial dan ekonomi juga dapat mempengaruhi konsistensi peran sosial masyarakat dari waktu ke waktu.

e. Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif

Sasaran PD	Indikator	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat kemajua n (%)
Terwujudnya tata Kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	75,85 nilai	79,03 nilai	104,19

Capaian indikator “Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah” pada sasaran terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan realisasi sebesar 79,03 dari target akhir Renstra 75,85, atau tingkat kemajuan mencapai 104,19 persen. Capaian ini tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target yang ditetapkan, yang mengindikasikan adanya peningkatan signifikan dalam

kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi kinerja organisasi. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan perangkat daerah telah berjalan optimal dan memberikan hasil yang nyata.

Dari sisi outcome, peningkatan nilai reformasi birokrasi berdampak pada semakin baiknya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta terbangunnya sistem kerja yang lebih profesional dan berorientasi hasil. Selain itu, capaian ini juga menunjukkan bahwa implementasi manajemen kinerja, penguatan sistem pengendalian internal, serta penataan organisasi dan tata laksana telah berjalan dengan baik. Dampak lanjutannya adalah meningkatnya efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.

Namun demikian, meskipun capaian telah melampaui target, masih terdapat tantangan yang perlu diantisipasi untuk menjaga keberlanjutan kinerja, seperti konsistensi implementasi reformasi birokrasi di seluruh unit kerja, peningkatan kualitas SDM aparatur, serta adaptasi terhadap tuntutan digitalisasi dan inovasi pelayanan publik. Selain itu, masih diperlukan penguatan budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pelayanan agar capaian tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif.

3.1.5 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja level nasional/internasional

a. Indeks Kesejahteraan Sosial

Tujuan RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Realisasi tahun n	Realisasi Nasional	Realisasi Provinsi	Kabupaten Mojokerto	Kabupaten Lamongan
Terciptanya SDM yang berkualitas, berbudi luhur, religius dan berbudaya global	Indeks kesejahteraan sosial	63,36 indeks	Belum rilis	58,73	61,70 indeks	65,80 indeks

Berdasarkan tabel perbandingan capaian Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS), realisasi Kabupaten Jombang pada tahun berjalan sebesar 63,36 indeks menunjukkan kinerja yang relatif baik dalam konteks regional. Apabila dibandingkan dengan capaian tingkat Provinsi sebesar 58,73, Kabupaten Jombang berada di atas rata-rata provinsi dengan selisih 4,63

poin. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jombang lebih progresif dibandingkan capaian agregat provinsi, serta mencerminkan efektivitas program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan.

Dibandingkan dengan kabupaten pembanding, posisi Jombang juga cukup kompetitif. Nilai IKESOS Jombang (63,36) lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Mojokerto (61,70) dengan selisih 1,66 poin, yang menunjukkan keunggulan relatif dalam pemenuhan kebutuhan dasar, peranan sosial, maupun keberdayaan ekonomi. Namun demikian, Jombang masih berada di bawah Kabupaten Lamongan yang mencapai 65,80, dengan selisih 2,44 poin. Selisih ini mengindikasikan adanya ruang perbaikan, terutama dalam dimensi yang paling berpengaruh terhadap peningkatan indeks, seperti keberdayaan ekonomi dan penguatan kebijakan inklusif.

Meskipun realisasi nasional belum dirilis, posisi Jombang yang berada di atas rata-rata provinsi serta unggul atas salah satu kabupaten pembanding menunjukkan bahwa capaian IKESOS telah mendukung sasaran strategis “Terciptanya SDM yang berkualitas, berbudi luhur, religius dan berbudaya global.” Secara keseluruhan, Kabupaten Jombang berada dalam posisi yang cukup kuat secara regional, namun tetap perlu melakukan akselerasi kebijakan untuk memperkecil selisih dengan daerah yang memiliki capaian tertinggi dan menjaga konsistensi peningkatan indeks pada tahun-tahun mendatang

b. Tingkat Kemiskinan

Tujuan RPJMD	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi tahun n	Realisasi Nasional	Realisasi Provinsi	Kabupaten Mojokerto	Kabupaten Lamongan
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat kemiskinan	8,36 persen atau 107,82 ribu jiwa	8,25 persen atau 23,36 juta orang	9,50 persen atau 3,876 juta orang	8,76 persen	12,03 persen

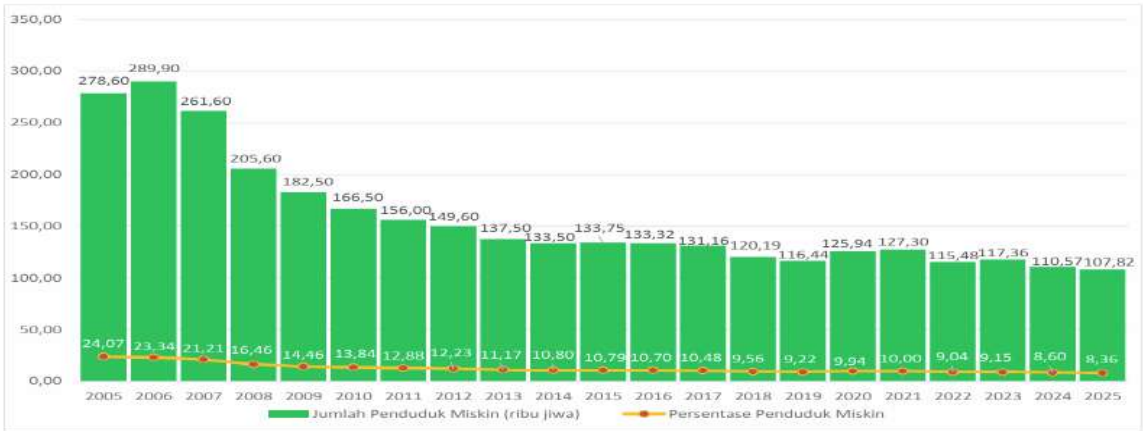
a. Kemiskinan Kabupaten Jombang

- Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan /GK) di Kabupaten Jombang pada bulan Maret 2025 mencapai 107,82 ribu jiwa. Jumlah ini turun sebesar 2,75 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2024 yang sebesar 110,57 ribu jiwa

- Persentase penduduk miskin di Kabupaten Jombang juga mengalami penurunan dari 8,60 persen pada bulan Maret 2024 menjadi sebesar 8,36 persen pada bulan Maret 2025

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang, Maret 2005-Maret 2025

Selama periode Maret 2024-Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jombang turun sebanyak 2,75 ribu jiwa, dari 110,57 ribu jiwa pada Maret 2024 menjadi 107,82 ribu jiwa pada Maret 2025 atau mengalami penurunan sebesar 2,49 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin di Kabupaten Jombang dalam rentang waktu satu tahun mengalami penurunan sebesar 0,24 poin, dari 8,60 persen pada Maret 2024 menjadi 8,36 persen pada Maret 2025



Secara umum, dalam periode 2005-2025 tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang cenderung mengalami penurunan, baik jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2005 sebesar 278,60 ribu jiwa, berkurang sebesar 170,78 ribu jiwa menjadi 107,82 ribu jiwa pada tahun 2025. Sementara itu, persentase penduduk miskin di Kabupaten Jombang pada tahun 2005 sebesar 24,07 persen, berkurang sebesar 15,71 poin atau menjadi 8,36 persen pada tahun 2025. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang tahun 2005 sampai dengan 2025 seperti pada tabel berikut:

Tahun	Garik Kemiskinan/GK (rupiah per kapita sebulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (P0)
(1)	(2)	(3)	(4)
2005	152.175	278,6	24,07
2006	166.646	289,9	23,34
2007	173.564	261,6	21,21
2008	184.252	205,6	16,46
2009	210.867	182,5	14,46
2010	229.976	166,5	13,84
2011	251.704	156	12,88
2012	270.930	149,6	12,23
2013	289.841	137,5	11,17
2014	301.162	133,5	10,8
2015	316.922	133,75	10,79
2016	337.217	133,32	10,7
2017	353.456	131,16	10,48
2018	374.895	120,19	9,56
2019	399.633	116,44	9,22
2020	410.116	125,94	9,94
2021	421.172	127,3	10
2022	448.830	115,48	9,04
2023	488.754	117,36	9,15
2024	514.170	110,57	8,6
2025	532.053	107,82	8,36

b. Kemiskinan Provinsi Jawa Timur

- Persentase penduduk miskin pada september 2025 sebesar 9,30 persen, menurun 0,20 persen poin terhadap maret 2025
- Jumlah penduduk miskin pada september 2025 sebesar 3,804 juta orang, menurun 71,59 ribu orang terhadap maret 2025
- Persentase penduduk miskin perkota pada Maret 2025 sebesar 7,00 persen, turun menjadi 6,93 persen pada September 2025. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret

2025 sebesar 12,86 persen, turun menjadi 12,55 persen pada September 2025

- Garis Kemiskinan pada September 2025 tercatat sebesar Rp. 585,020 per kapita per bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp. 447.332 (76,46 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp. 137.688 (23,54 persen)
- Pada September 2025, secara rata-rata rumah tangga miskin di Jawa Timur memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp. 2.538.987,- per rumah tangga miskin per bulan



c. Kemiskinan Nasional

- Persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 8,25 persen, menurun 0,22 poin terhadap Maret 2025 dan menurun 0,32 poin terhadap September 2024

- Jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebesar 23,36 juta orang, menurun 0,49 juta orang terhadap Maret 2025 dan menurun 0,70 juta orang terhadap September 2024
- Persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2025 sebesar 6.60 persen, turun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 6,73 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin di perdesaan pada September 2025 sebesar 10,72 persen, menurun dibandingkan Maret 2025 sebesar 11,03 persen
- Dibanding Maret 2025, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada September 2025 berkurang sebanyak 0,09 juta orang (dari 11,27 juta orang pada Maret 2025 menjadi 11,18 juta orang pada September 2025). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di perdesaan berkurang sebanyak 0,40 juta orang (dari 12,58 juta orang pada Maret 2025 menjadi 12,18 juta orang pada September 2025)



Pada **tujuan meningkatnya kesejahteraan masyarakat** dengan indikator *tingkat kemiskinan*, capaian Kabupaten Jombang sebesar **8,36 persen (107,82 ribu jiwa)** menunjukkan kinerja yang relatif baik namun masih perlu penguatan. Jika dibandingkan dengan **nasional (8,25 persen)** terdapat **GAP +0,11 persen**, yang berarti tingkat kemiskinan Jombang sedikit lebih tinggi dari rata-rata

nasional. Sementara itu dibandingkan dengan **provinsi (9,50 persen)**, capaian Jombang lebih baik dengan GAP **-1,14 persen**, menunjukkan kinerja yang cukup unggul di tingkat regional. Dibandingkan kabupaten sekitar, Jombang **lebih baik dari Kabupaten Mojokerto (8,76 persen)** dengan GAP **-0,40 persen**, dan jauh lebih baik dibandingkan **Kabupaten Lamongan (12,03 persen)** dengan GAP **-3,67 persen**.

Interpretasi GAP ini menunjukkan bahwa posisi Jombang cukup kompetitif di tingkat regional, namun masih perlu upaya ekstra untuk mencapai atau melampaui capaian nasional. Selisih kecil terhadap nasional mengindikasikan bahwa persoalan kemiskinan di Jombang relatif terkendali, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam hal percepatan penurunannya.

Dari sisi **kelebihan**, Dinas Sosial Jombang telah mampu menekan angka kemiskinan lebih rendah dibandingkan provinsi dan beberapa daerah pembanding, yang menunjukkan bahwa program perlindungan sosial, bantuan sosial, serta intervensi penanganan kemiskinan sudah berjalan cukup efektif. Selain itu, capaian ini mencerminkan adanya sinergi kebijakan daerah yang cukup baik dalam menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat.

Namun, terdapat beberapa **kekurangan** yang masih menjadi tantangan, antara lain belum optimalnya program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan bagi PPKS, masih adanya ketergantungan pada bantuan sosial, serta kemungkinan belum sepenuhnya tepat sasaran akibat dinamika data kemiskinan. Selain itu, integrasi lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya kuat, sehingga dampak intervensi belum maksimal dalam menurunkan angka kemiskinan secara lebih cepat.

Adapun **strategi unggul yang dapat diadopsi**, terutama untuk mengejar capaian nasional dan meningkatkan kinerja lebih lanjut, antara lain: (1) penguatan program graduasi bantuan sosial menuju kemandirian melalui pemberdayaan ekonomi produktif, (2) integrasi program penanggulangan kemiskinan lintas OPD secara berbasis keluarga (*family development approach*), (3) optimalisasi pemanfaatan data terpadu yang dimutakhirkan secara berkala

untuk meningkatkan ketepatan sasaran, serta (4) penguatan peran desa dan komunitas dalam intervensi kemiskinan berbasis lokal. Selain itu, praktik baik dari daerah dengan tingkat kemiskinan lebih rendah di tingkat nasional dapat diadopsi, seperti pengembangan program kewirausahaan sosial dan kolaborasi dengan sektor swasta.

Dengan strategi tersebut, Dinas Sosial Jombang diharapkan mampu menekan angka kemiskinan lebih cepat, memperkecil GAP dengan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan.

c. Tujuan PD : Meningkatnya kesejahteraan sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial

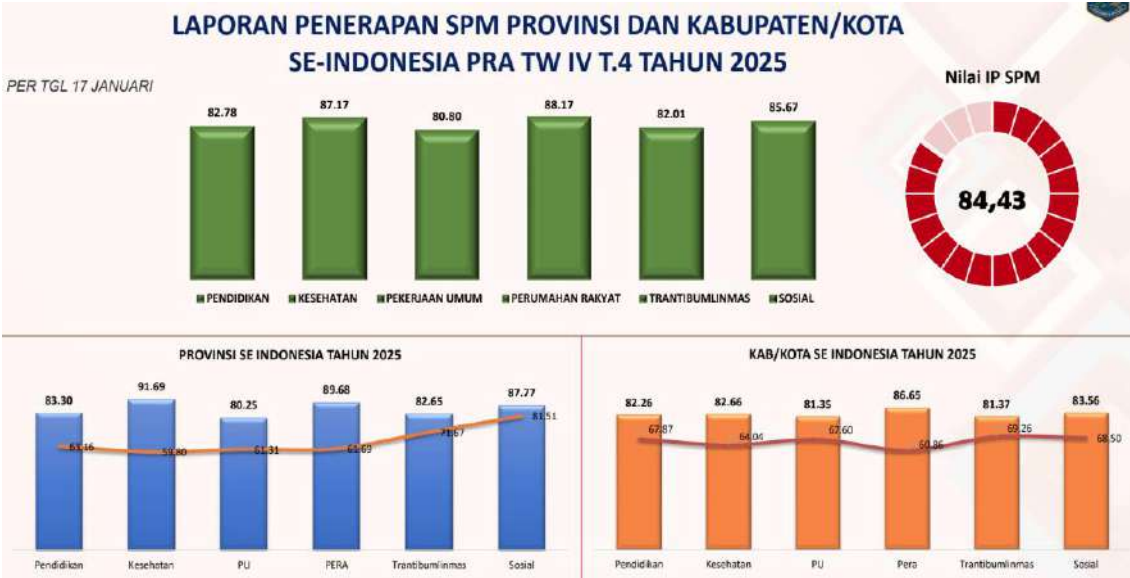
Tujuan PD	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Kemensos:				
Tujuan 1: Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial Masyarakat miskin dan rentan	Indeks kesejahteraan sosial	59,51 indeks		
Tujuan 2: Meningkatkan tata Kelola kesejahteraan sosial yang berdampak	Indeks reformasi birokrasi Kementerian Sosial	87 indeks		
Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur				
Tujuan: Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Indeks kesejahteraan sosial	57,45		
Dinas Sosial Kab. Jombang:				
Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase penurunan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	1,2	1,19	

d. Sasaran PD : Meningkatnya akses terhadap layanan sosial

Indikator 1 : Persentase Capaian SPM Bidang Sosial

Sasaran PD	Indikator	Realisasi tahun n	Realisasi Nasional	Realisasi Provinsi
------------	-----------	-------------------	--------------------	--------------------

Meningkatnya akses terhadap layanan sosial	Persentase capaian SPM bidang sosial	99,03 persen	85,67 persen	87,77 persen
--	--------------------------------------	--------------	--------------	--------------



Pada **sasaran strategis meningkatnya akses terhadap layanan sosial** dengan indikator *persentase capaian SPM bidang sosial*, Kabupaten Jombang mencatat realisasi sebesar **99,03 persen**, yang menunjukkan kinerja sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan **nasional (85,67 persen)** terdapat **GAP +13,36 persen**, dan dibandingkan dengan **provinsi (87,77 persen)** terdapat **GAP +11,26 persen**. Selisih yang cukup signifikan ini menempatkan Jombang sebagai daerah dengan capaian yang jauh di atas rata-rata, sekaligus menunjukkan bahwa pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial telah dilaksanakan secara optimal.

Interpretasi GAP tersebut mengindikasikan bahwa Dinas Sosial Jombang memiliki keunggulan dalam hal jangkauan dan pemenuhan layanan dasar sosial dibandingkan tingkat nasional maupun provinsi. Tingginya capaian ini mencerminkan bahwa sistem pelayanan telah berjalan efektif, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Selain itu, hampir seluruh indikator SPM telah terpenuhi, yang berarti akses masyarakat terhadap layanan sosial sudah sangat luas dan merata.

Dari sisi **kelebihan**, perangkat daerah memiliki kapasitas yang kuat dalam memastikan pemenuhan SPM, didukung oleh mekanisme kerja yang terstruktur, komitmen terhadap pelayanan publik, serta kemungkinan adanya sistem monitoring dan evaluasi yang berjalan baik. Pemanfaatan data dan koordinasi internal juga terlihat efektif sehingga mampu mencapai kinerja yang melampaui standar nasional dan provinsi.

Namun demikian, terdapat beberapa **potensi kekurangan** yang perlu dicermati, meskipun capaian sudah tinggi. Di antaranya adalah risiko bahwa capaian lebih bersifat administratif (compliance) dibandingkan kualitas layanan substantif, serta potensi beban kerja SDM yang tinggi untuk mempertahankan capaian tersebut. Selain itu, masih terdapat gap kecil menuju 100 persen yang menunjukkan bahwa belum seluruh komponen SPM terpenuhi secara sempurna, kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan jangkauan di wilayah tertentu atau dinamika data sasaran.

Adapun **strategi unggul yang dimiliki Jombang** yang dapat terus diperkuat dan direplikasi, antara lain: (1) penerapan sistem pelayanan terpadu yang memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai jenis layanan sosial, (2) penggunaan data yang relatif akurat dan terintegrasi dalam perencanaan dan penyaluran layanan, (3) penguatan monitoring dan evaluasi capaian SPM secara berkala, serta (4) komitmen kuat terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai prioritas utama.

Ke depan, strategi yang dapat dikembangkan lebih lanjut adalah meningkatkan kualitas layanan, memperkuat digitalisasi layanan sosial, serta berbagi praktik baik (best practices) kepada daerah lain. Dengan demikian, Dinas Sosial Jombang tidak hanya unggul dalam capaian kuantitatif, tetapi juga dalam kualitas dan inovasi pelayanan sosial yang berkelanjutan.

Indikator 2 : Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Sasaran PD	Indikator	Realisasi tahun n	Realisasi Nasional	Realisasi Provinsi	Kab Mojokerto	Kab Lamongan
Meningkatnya akses terhadap layanan sosial	Indeks pemenuhan kebutuhan dasar	60,82 indeks	-	60,96 indeks	65,13 indeks	54,95 indeks

Pada **sasaran strategis meningkatnya akses terhadap layanan sosial** dengan indikator *Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar*, capaian Kabupaten Jombang sebesar **60,82 indeks** menunjukkan kinerja yang **sedikit lebih rendah dibandingkan Provinsi (60,96 indeks)** dengan GAP sebesar **-0,14**, namun masih berada pada posisi yang cukup kompetitif. Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, capaian Jombang **lebih rendah dari Kabupaten Mojokerto (65,13 indeks)** dengan GAP **-4,31**, tetapi **lebih tinggi dari Kabupaten Lamongan (54,95 indeks)** dengan GAP **+5,87**. Hal ini menempatkan Jombang pada posisi menengah—belum menjadi yang terbaik, namun sudah melampaui sebagian daerah pembanding.

Interpretasi GAP tersebut menunjukkan bahwa secara umum akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar di Jombang sudah cukup baik, tetapi masih terdapat ruang perbaikan terutama dalam mengejar ketertinggalan dari Kabupaten Mojokerto dan sedikit peningkatan untuk melampaui capaian provinsi. Kesenjangan terbesar terhadap Mojokerto mengindikasikan adanya perbedaan efektivitas intervensi program, cakupan layanan, maupun integrasi lintas sektor dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Dari sisi **kelebihan**, Dinas Sosial Jombang telah mampu menjaga capaian yang stabil dan berada di atas beberapa daerah pembanding, yang menunjukkan bahwa program bantuan sosial dan pelayanan dasar sudah berjalan dengan cukup efektif dan menjangkau sebagian besar sasaran. Selain itu, capaian yang mendekati rata-rata provinsi menunjukkan adanya keselarasan kebijakan dan implementasi program dengan arah kebijakan di tingkat yang lebih tinggi.

Namun, terdapat beberapa **kekurangan** yang perlu diperhatikan, antara lain belum optimalnya integrasi program lintas sektor (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi), kemungkinan masih adanya ketidaktepatan sasaran akibat dinamika data PPKS, serta belum maksimalnya program

pemberdayaan yang mampu meningkatkan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini dapat menyebabkan capaian indeks belum mampu melampaui daerah dengan performa lebih tinggi seperti Mojokerto.

Adapun **strategi unggul yang dapat diadopsi**, khususnya dari Kabupaten Mojokerto yang memiliki capaian lebih tinggi, antara lain: (1) penguatan integrasi program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga secara terpadu lintas OPD, (2) optimalisasi pemanfaatan data terpadu yang diperbarui secara berkala untuk memastikan ketepatan sasaran intervensi, (3) pengembangan program pemberdayaan ekonomi produktif yang terhubung dengan pasar sehingga meningkatkan kemandirian penerima manfaat, serta (4) peningkatan peran pemerintah desa dan kelembagaan sosial dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara partisipatif.

Dengan mengadopsi dan mengadaptasi strategi-strategi tersebut, Dinas Sosial Jombang berpeluang untuk meningkatkan capaian Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar secara lebih signifikan, sekaligus memperkecil GAP dengan daerah yang lebih unggul dan melampaui capaian rata-rata provinsi.

Indikator 3 : Indeks Peranan Sosial

Sasaran PD	Indikator	Realisasi tahun n	Realisasi Nasional	Realisasi Provinsi	Kabupaten Mojokerto	Kabupaten Lamongan
Meningkatnya akses terhadap layanan sosial	Indeks peranan sosial	76,31 indeks	Belum rilis	55,46 indeks	71,84 indeks	75,41 indeks

Pada **tujuan meningkatnya akses terhadap layanan sosial** dengan indikator *Indeks Peranan Sosial*, capaian Kabupaten Jombang sebesar **76,31 indeks** menunjukkan performa yang sangat baik dan kompetitif. Dibandingkan dengan **provinsi (55,46 indeks)** terdapat GAP yang sangat signifikan yaitu **+20,85**, yang menandakan bahwa tingkat partisipasi sosial dan keberfungsian sosial masyarakat di Jombang jauh lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, Jombang juga **lebih unggul dari Kabupaten Mojokerto (71,84 indeks)** dengan GAP **+4,47**, serta sedikit lebih tinggi dari **Kabupaten Lamongan (75,41 indeks)** dengan GAP **+0,90**. Meskipun data nasional

belum tersedia, secara regional posisi Jombang dapat dikategorikan sebagai daerah dengan capaian unggul.

Interpretasi GAP ini menunjukkan bahwa ekosistem sosial di Kabupaten Jombang telah berkembang dengan baik, terutama dalam hal partisipasi masyarakat, kepedulian sosial, serta peran aktif kelembagaan sosial. Selisih yang besar terhadap provinsi mengindikasikan keberhasilan pendekatan pemberdayaan sosial berbasis komunitas yang lebih efektif dibandingkan daerah lain. Namun, selisih yang relatif kecil dengan Lamongan juga menjadi sinyal bahwa keunggulan ini perlu terus dijaga dan ditingkatkan agar tidak stagnan atau terlampaui.

Dari sisi **kelebihan**, Dinas Sosial Jombang mampu mengoptimalkan peran pilar-pilar sosial seperti TKSK, Karang Taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial dalam mendukung program pemerintah. Selain itu, adanya keterlibatan masyarakat secara aktif menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga partisipatif. Hal ini menjadi kekuatan utama dalam meningkatkan indeks peranan sosial secara berkelanjutan.

Sementara itu, **kekurangan atau area yang perlu diperkuat** antara lain potensi belum meratanya tingkat partisipasi sosial di seluruh wilayah, terutama di daerah dengan tingkat kerentanan sosial yang tinggi. Selain itu, sistem pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan sosial mungkin belum sepenuhnya terstandarisasi, sehingga kualitas peran sosial antar wilayah bisa berbeda. Tantangan lainnya adalah menjaga konsistensi partisipasi masyarakat agar tetap tinggi di tengah dinamika sosial dan ekonomi.

Adapun **strategi unggul yang dapat diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut**, baik dari praktik internal maupun pembelajaran dari daerah seperti Lamongan, antara lain: (1) penguatan kelembagaan sosial berbasis desa melalui dukungan regulasi dan fasilitasi berkelanjutan, (2) pemberian insentif dan peningkatan kapasitas bagi pilar-pilar sosial agar lebih profesional dan berdaya, (3) pengembangan program berbasis komunitas yang terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi lokal, serta (4) peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat untuk memperluas dampak sosial.

Dengan mempertahankan keunggulan yang ada serta mengadopsi strategi inovatif tersebut, Dinas Sosial Jombang berpotensi memperkuat

posisi sebagai daerah dengan tingkat peranan sosial yang tinggi, sekaligus memastikan pemerataan dan keberlanjutan dampak di seluruh wilayah.

e. Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif

Tujuan PD	Indikator Kinerja Utama	Realisasi tahun n	Realisasi Nasional	Realisasi Provinsi
Terwujudnya tata Kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	79,03	86,46	83,62

Berdasarkan capaian indikator *Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah*, kinerja pada tahun berjalan sebesar **79,03** menunjukkan bahwa tata kelola birokrasi sudah berada pada kategori baik, namun jika dibandingkan dengan **nasional (86,46)** dan **provinsi (83,62)** masih terdapat GAP masing-masing sebesar **-7,43** dan **-4,59**. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun perangkat daerah telah menunjukkan kinerja yang cukup solid, masih terdapat ruang peningkatan agar dapat sejajar atau melampaui capaian di tingkat provinsi maupun nasional.

Jika dilihat dari tren tahun sebelumnya, capaian reformasi birokrasi menunjukkan pola **fluktuatif namun cenderung membaik**. Tahun 2023 mencatat nilai yang tinggi (81,49), kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024 (75,59), dan kembali meningkat pada tahun 2025 (79,03). Pola ini menunjukkan bahwa perangkat daerah mampu melakukan recovery/perbaikan setelah mengalami penurunan, meskipun belum kembali ke posisi tertinggi sebelumnya maupun menyamai capaian nasional dan provinsi.

Penurunan kinerja pada tahun 2024 dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi secara merata di seluruh unit kerja, adanya perubahan indikator atau bobot penilaian, serta keterbatasan dalam penyediaan data dukung (eviden) yang sesuai standar evaluasi. Selain itu, faktor kapasitas SDM dan konsistensi dalam penerapan manajemen kinerja juga berpengaruh terhadap capaian. Sementara itu, peningkatan

kembali pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan melalui penguatan komitmen organisasi, peningkatan kualitas pelaporan kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam mendukung tata kelola pemerintahan.

Dari sisi perbandingan dengan nasional dan provinsi, selisih yang masih cukup signifikan menunjukkan adanya **kekurangan**, antara lain belum optimalnya inovasi pelayanan publik, belum meratanya implementasi reformasi birokrasi berbasis digital, serta perlunya penguatan budaya kerja yang berorientasi hasil dan dampak. Di sisi lain, **kelebihan** yang dimiliki adalah kemampuan untuk mempertahankan capaian di atas target internal serta adanya tren perbaikan setelah penurunan, yang menunjukkan sistem pengendalian kinerja sudah berjalan.

Sebagai alternatif solusi yang telah dan perlu terus dilakukan, perangkat daerah melakukan penguatan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh hingga level unit kerja, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan teknis, serta optimalisasi digitalisasi proses bisnis (e-office, e-kinerja, e-planning). Selain itu, diperlukan benchmarking dan adopsi praktik baik dari daerah atau instansi dengan capaian lebih tinggi (nasional/provinsi), khususnya dalam inovasi pelayanan publik dan penguatan akuntabilitas kinerja. Penguatan monitoring dan evaluasi berbasis hasil juga menjadi kunci agar setiap program reformasi birokrasi memberikan dampak nyata dan berkontribusi pada peningkatan nilai secara berkelanjutan.

3.1.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinas Sosial telah menerapkan kebijakan efisiensi berbasis kinerja (performance ased budgeting) dengan memprioritaskan program yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian indikator RPJMD, khususnya penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Strategi umum yang dilakukan meliputi:

1. refocusing dan rasionalisasi anggaran pada kegiatan yang berdampak langsung kepada PPKS,
2. integrasi dan pemanfaatan data terpadu (DTKS/DTSEN) untuk menghindari duplikasi bantuan dan meningkatkan ketepatan sasaran,

- 3. Optimalisasi SDM melalui penugasan berbasis kompetensi dan multi-tasking,
- 4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan pelaporan untuk menekan biaya operasional, serta
- 5. Optimalisasi penggunaan aset daerah melalui pemanfaatan bersama (shared resources) dan peningkatan fungsi sarana prasarana yang ada. Selain itu, dilakukan penguatan kolaborasi lintas sektor dan kemitraan dengan pihak non-pemerintah untuk menutup keterbatasan sumber daya.

Strategi per sasaran:

- 1. Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS
Efisiensi dilakukan melalui penajaman sasaran program bantuan sosial dan rehabilitasi sosial berbasis data terverifikasi, sehingga anggaran lebih tepat guna dan tidak terjadi tumpang tindih penerima manfaat. SDM pendamping sosial dioptimalkan dengan pola kerja wilayah dampingan prioritas, serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan tanpa menambah jumlah personel secara signifikan.
- 2. Meningkatnya akses terhadap layanan sosial (SPM Sosial)
- 3. Meningkatnya akses terhadap layanan sosial (Indeks pemenuhan kebutuhan dasar)
- 4. Meningkatnya akses terhadap layanan sosial (Indeks peranan sosial)
- 5. Terwujudnya tata Kelola birokrasi yang bersih dan efektif (Nilai reformasi birokrasi)

a. Efisiensi Anggaran

Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian Anggaran
Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS	100,83	37.980.796.513	33.495.349.566	88,19
Meningkatnya akses terhadap layanan sosial (SPM Sosial)	99,03	2.636.317.450	2.631.475.715	99,82
Meningkatnya akses terhadap layanan sosial (Indeks pemenuhan kebutuhan dasar)	100	28.377.436.188	24.411.275.009	86,02
Meningkatnya akses terhadap layanan sosial (Indeks peranan sosial)	100	1.506.482.186	1.449.515.097	96,22

Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian Anggaran
Terwujudnya tata Kelola birokrasi yang bersih dan efektif (Nilai reformasi birokrasi)	104,47	5.460.560.689	5.003.083.745	91,62

Perbandingan antara **capaian kinerja dan capaian anggaran** menunjukkan bahwa secara umum seluruh sasaran strategis telah mencapai kinerja **sangat tinggi ($\geq 99\%$)**, bahkan terdapat yang melampaui target (104,47), sementara **capaian anggaran relatif lebih rendah (86%–99%)**. Hal ini mengindikasikan bahwa perangkat daerah telah mampu menghasilkan output/outcome optimal dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien (value for money).

Pada sasaran **meningkatnya kesejahteraan PPKS**, capaian kinerja mencapai **100,83%** dengan capaian anggaran **88,19%**. Ini menunjukkan efisiensi cukup tinggi karena hasil melampaui target dengan serapan anggaran tidak maksimal. Strategi konkret yang dilakukan antara lain penajaman sasaran bantuan sosial berbasis data terpadu sehingga mengurangi duplikasi penerima, optimalisasi pendamping sosial tanpa penambahan SDM baru, serta pengurangan kegiatan seremonial dan perjalanan dinas yang tidak prioritas. Selain itu, dilakukan kolaborasi dengan CSR dan lembaga sosial untuk mendukung pembiayaan kegiatan pemberdayaan.

Pada sasaran **akses layanan sosial (SPM Sosial)**, capaian kinerja **99,03%** dengan serapan anggaran **99,82%** menunjukkan keselarasan tinggi antara penggunaan anggaran dan hasil. Efisiensi dilakukan melalui digitalisasi pelaporan SPM sehingga mengurangi penggunaan ATK, pelaksanaan rapat koordinasi secara daring, serta penyederhanaan kegiatan yang bersifat administratif tanpa mengurangi kualitas layanan.

Pada sasaran **akses layanan sosial (Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar)**, capaian kinerja **100%** dengan anggaran **86,02%** menunjukkan efisiensi signifikan. Strategi yang dilakukan meliputi integrasi program lintas sektor sehingga menghindari duplikasi anggaran, pengalihan kegiatan ke bentuk bantuan langsung yang lebih tepat sasaran, serta

optimalisasi aset yang sudah ada (misalnya pemanfaatan fasilitas pemerintah/desa untuk layanan sosial tanpa biaya tambahan).

Pada sasaran **akses layanan sosial (Indeks Peranan Sosial)**, capaian kinerja **100%** dengan serapan anggaran **96,22%** menunjukkan efisiensi moderat. Langkah konkret yang dilakukan adalah pemberdayaan pilar-pilar sosial (TKSK, Karang Taruna, relawan) sebagai mitra tanpa biaya besar, pemanfaatan fasilitas masyarakat untuk kegiatan sosial, serta pelaksanaan kegiatan berbasis komunitas yang lebih hemat biaya dibandingkan pendekatan proyek.

Pada sasaran **terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif**, capaian kinerja **104,47%** dengan anggaran **91,62%** menunjukkan efisiensi yang baik dengan hasil melampaui target. Strategi efisiensi yang dilakukan antara lain digitalisasi administrasi (e-office, e-kinerja) untuk mengurangi penggunaan kertas dan ATK, pembatasan perjalanan dinas secara selektif dan berbasis kebutuhan prioritas, penyelenggaraan rapat secara hybrid/daring, serta efisiensi belanja makan minum melalui kebijakan sederhana seperti penggunaan tumbler dan pengurangan konsumsi rapat.

Secara keseluruhan, efisiensi anggaran dicapai melalui beberapa strategi utama, yaitu: **(1) digitalisasi proses kerja, (2) selektivitas belanja operasional, (3) optimalisasi SDM dan aset yang ada**, serta **(4) kolaborasi pendanaan non-APBD**. Pendekatan ini terbukti mampu menjaga bahkan meningkatkan capaian kinerja tanpa harus mengoptimalkan seluruh anggaran, sehingga mencerminkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan berorientasi hasil.

b. Efisiensi SDM

Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Jumlah Kebutuhan SDM	Jumlah SDM	Pemenuhan kebutuhan SDM
Meningkatnya kesejahteraan PPKS	100,83	86	37	49
Meningkatnya akses terhadap layanan sosial (SPM Sosial)	99,03			
Meningkatnya akses terhadap layanan sosial (Indeks pemenuhan kebutuhan dasar)	100			
Meningkatnya akses terhadap layanan sosial (Indeks peranan sosial)	100			

Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Jumlah Kebutuhan SDM	Jumlah SDM	Pemenuhan kebutuhan SDM
Terwujudnya tata Kelola birokrasi yang bersih dan efektif (Nilai reformasi birokrasi)	104,47			
Rata-rata	10,92			

Perbandingan antara **capaian kinerja dan tingkat pemenuhan SDM** menunjukkan bahwa perangkat daerah mampu mencapai kinerja **sangat tinggi (≥99%)**, bahkan melampaui target pada beberapa sasaran, meskipun tingkat pemenuhan SDM masih terbatas. Pada sasaran *meningkatnya kesejahteraan PPKS*, kebutuhan SDM sebanyak **86 orang**, namun tersedia hanya **37 orang** atau sekitar **49% pemenuhan**, sementara capaian kinerja justru mencapai **100,83%**. Kondisi ini menegaskan bahwa keterbatasan SDM tidak menjadi penghambat utama dalam pencapaian kinerja, melainkan justru mendorong perangkat daerah untuk melakukan berbagai strategi efisiensi dan optimalisasi SDM. Pola ini juga tercermin pada sasaran lain, di mana capaian kinerja tetap tinggi meskipun secara umum terdapat keterbatasan sumber daya manusia.

Dari kondisi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa perangkat daerah memiliki **efektivitas pengelolaan SDM yang baik**, dengan memaksimalkan produktivitas pegawai yang ada. Namun di sisi lain, terdapat potensi risiko seperti beban kerja yang tinggi, multitasking yang berlebihan, serta potensi penurunan kualitas layanan dalam jangka panjang apabila tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas SDM.

Langkah-langkah konkret yang telah dilakukan dalam rangka **efisiensi dan optimalisasi SDM** antara lain:

1. Penyederhanaan birokrasi dan struktur organisasi, sehingga alur kerja menjadi lebih ringkas dan tidak membutuhkan banyak jenjang atau personel. Hal ini mengurangi kebutuhan SDM tanpa mengurangi output kinerja.
2. Optimalisasi peran pilar-pilar sosial dan relawan (seperti TKSK, Karang Taruna, dan pekerja sosial masyarakat) sebagai perpanjangan tangan pemerintah, sehingga sebagian fungsi pelayanan dapat dilakukan tanpa menambah ASN.
3. Digitalisasi layanan administrasi, seperti penggunaan e-office, e-kinerja, dan sistem pelaporan berbasis aplikasi, yang mampu

- mengurangi kebutuhan tenaga administrasi serta meningkatkan efisiensi kerja.
4. Pengaturan beban kerja berbasis prioritas kinerja, dengan memfokuskan SDM pada program yang memiliki dampak langsung terhadap indikator kinerja utama, sementara kegiatan yang kurang prioritas diminimalkan.
 5. Kolaborasi lintas sektor dan kemitraan sehingga sebagian beban kerja dapat dibagi dengan perangkat daerah lain, lembaga sosial, maupun pihak swasta tanpa menambah kebutuhan SDM internal.

c. Efisiensi Aset

Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Jumlah Kebutuhna Aset	Jumlah Aset	Pemenuhan kebutuhan Aset
Meningkatnya kesejahteraan PPKS	100,83	481	325	63
Meningkatnya akses terhadap layanan sosial (SPM Sosial)	99,03			
Meningkatnya akses terhadap layanan sosial (Indeks pemenuhan kebutuhan dasar)	100			
Meningkatnya akses terhadap layanan sosial (Indeks peranan sosial)	100			
Terwujudnya tata Kelola birokrasi yang bersih dan efektif (Nilai reformasi birokrasi)	104,47			
Rata-rata	10,92			

Perbandingan antara **capaian kinerja dan tingkat pemenuhan aset** menunjukkan bahwa meskipun tingkat pemenuhan aset baru mencapai sekitar **63% (325unit dari kebutuhan 481 unit)**, seluruh sasaran strategis tetap mampu mencapai kinerja **sangat tinggi (≥99%)**, bahkan melampaui target pada beberapa indikator (hingga 104,47%). Hal ini mengindikasikan bahwa keterbatasan aset tidak menjadi hambatan signifikan dalam pencapaian kinerja, melainkan mendorong perangkat daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan aset yang tersedia secara lebih efektif dan efisien

Kondisi ini mencerminkan adanya **efisiensi pemanfaatan aset**, di mana aset yang tersedia telah digunakan secara maksimal untuk mendukung berbagai program dan layanan. Namun demikian, terdapat potensi risiko seperti overutilization (penggunaan berlebih), penurunan kualitas aset akibat intensitas pemakaian tinggi, serta keterbatasan jangkauan layanan apabila kebutuhan aset tidak terpenuhi secara bertahap.

Langkah-langkah konkret yang telah dilakukan dalam rangka **efisiensi dan optimalisasi aset** antara lain:

1. Optimalisasi pemanfaatan aset yang ada (shared resources), seperti penggunaan gedung, kendaraan operasional, dan sarana prasarana secara bersama lintas bidang/program sehingga tidak perlu penambahan aset baru.
2. Identifikasi dan rasionalisasi kebutuhan aset, dengan meninjau kembali daftar kebutuhan agar hanya aset yang benar-benar prioritas dan mendukung indikator kinerja yang diusulkan, sehingga menghindari pengadaan yang tidak perlu.
3. Penghapusan aset yang tidak produktif atau rusak berat, sehingga tidak membebani biaya pemeliharaan dan dapat dilakukan peremajaan aset secara lebih terarah.
4. Peningkatan pemeliharaan aset secara berkala, untuk memperpanjang umur pakai aset yang tersedia sehingga tetap layak digunakan dalam mendukung pelayanan.
5. Digitalisasi layanan yang secara tidak langsung mengurangi kebutuhan aset fisik seperti ruang layanan, arsip, dan peralatan administrasi.

Secara keseluruhan, efisiensi aset telah dilakukan melalui pendekatan optimalisasi, rasionalisasi, dan kolaborasi, sehingga keterbatasan aset tidak menghambat pencapaian kinerja. Ke depan, strategi ini perlu diimbangi dengan perencanaan kebutuhan aset yang lebih presisi dan berbasis prioritas, agar pemenuhan aset dapat dilakukan secara bertahap tanpa mengurangi prinsip efisiensi dan efektivitas

3.2 Realisasi Anggaran

Pagu anggaran dan realisasi program/kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun 2025, sebagai berikut:

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5.460.560.689	5.003.083.745	91,62
Pemberdayaan sosial	1.352.174.025	1.296.494.997	95,88
Rehabilitasi Sosial	1.894.762.350	1.893.879.400	99,95
Perlindungan dan jaminan sosial	28.377.436.188	24.411.275.009	86,02
Penanganan bencana	741.555.100	737.596.315	99,47
Pengelolaan taman makam pahlawan	154.308.161	153.020.100	99,16
Jumlah	37.980.796.513	33.495.349.566	88,19

Realisasi anggaran perangkat daerah digunakan secara langsung untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dari total anggaran sebesar **Rp37.980.796.513**, telah direalisasikan sebesar **Rp33.495.349.566** atau **88,19%**, yang menunjukkan tingkat penyerapan yang cukup baik dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Pada **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, anggaran sebesar Rp5.460.560.689 direalisasikan Rp5.003.083.745 (91,62%), yang digunakan untuk mendukung operasional organisasi, termasuk administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan, serta peningkatan kapasitas aparatur. Program ini menjadi fondasi utama dalam memastikan kelancaran pelaksanaan seluruh program teknis.

Pada **Program Pemberdayaan Sosial**, realisasi anggaran mencapai Rp1.296.494.997 dari pagu Rp1.352.174.025 (95,88%), yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat serta kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Anggaran ini berkontribusi pada peningkatan indeks peranan sosial dan partisipasi masyarakat.

ada **Program Rehabilitasi Sosial**, realisasi hampir maksimal yaitu Rp1.893.879.400 dari Rp1.894.762.350 (99,95%), yang digunakan untuk pelayanan dan pemulihan fungsi sosial bagi PPKS. Tingginya realisasi menunjukkan fokus kuat pada layanan langsung kepada masyarakat rentan.

Pada **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**, sebagai program dengan alokasi terbesar, anggaran Rp28.377.436.188 direalisasikan Rp24.411.275.009 (86,02%). Anggaran ini digunakan untuk penyaluran

bantuan sosial, jaminan sosial, serta intervensi penanganan kemiskinan. Meskipun serapan tidak maksimal, program ini tetap memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan. **Pengadaan tanah untuk Sekolah Rakyat** merupakan salah satu penyebab realisasi tidak terserap secara optimal. Realisasi belanja modal tanah untuk pengadaan lahan sekolah rakyat menunjukkan efisiensi yang cukup signifikan. Dari pagu anggaran sebesar Rp11.860.240.000, terealisasi sebesar Rp8.202.010.976 atau 69,16%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 30,84%. Penggunaan anggaran tersebut antara lain untuk pembelian tanah di Desa Pucangro seluas 15.465 m² dengan harga Rp750.000 per m², serta pengadaan tanah tambahan senilai Rp7.911.254.300 dengan luas 11.576 m² atau terealisasi sebesar 68,21%. Selain melalui pembelian, pemenuhan kebutuhan lahan juga didukung oleh hibah tanah dari masyarakat seluas 51.450 m² tanpa menggunakan anggaran APBD. Dengan demikian, total kebutuhan lahan untuk sekolah rakyat seluas 63.026 m² telah terpenuhi 100%, yang terdiri dari kombinasi lahan hasil pembelian dan hibah. Capaian ini menunjukkan bahwa strategi pengadaan lahan dilakukan secara efektif dan efisien, dengan memanfaatkan sumber non-APBD secara optimal sehingga mampu menghasilkan penghematan anggaran yang cukup besar, yaitu sekitar 31,79%, tanpa mengurangi target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada **Program Penanganan Bencana**, realisasi sebesar Rp737.596.315 dari Rp741.555.100 (99,47%) digunakan untuk respons cepat terhadap kondisi darurat sosial dan bencana, termasuk bantuan logistik dan perlindungan korban terdampak.

Sedangkan pada **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**, realisasi Rp153.020.100 dari Rp154.308.161 (99,16%) dimanfaatkan untuk pemeliharaan sarana prasarana serta penghormatan nilai-nilai kepahlawanan.

Secara keseluruhan, penggunaan anggaran telah selaras dengan prioritas kinerja organisasi, terutama dalam mendukung pelayanan kepada PPKS dan peningkatan akses layanan sosial. Meskipun terdapat sisa anggaran pada beberapa program, hal tersebut lebih disebabkan oleh efisiensi pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi capaian output dan outcome. Dengan demikian, realisasi anggaran telah efektif dalam mewujudkan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

BAB 4

Penutup

4.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan, kinerja Dinas Sosial menunjukkan capaian yang **sangat baik dan konsisten melampaui target** pada sebagian besar indikator. Indikator strategis seperti capaian SPM, indeks pemenuhan kebutuhan dasar, indeks peranan sosial, serta nilai reformasi birokrasi berada pada kategori tinggi ($\geq 99\%$), bahkan beberapa melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial telah berjalan efektif, didukung oleh efisiensi anggaran, optimalisasi SDM, serta pemanfaatan aset yang terbatas namun produktif.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa area yang perlu diperkuat, seperti percepatan penurunan PPKS, peningkatan kualitas (bukan hanya kuantitas) layanan sosial, serta penguatan daya saing terhadap capaian nasional pada beberapa indikator.

4.2 Inovasi dan penghargaan

Inovasi yang telah dilakukan:

1. Integrasi data sosial (DTSEN, INTUISI) untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan
2. Digitalisasi pengelolaan taman makam pahlawan
3. Karepe dimesemi Bojo (Kawasan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Mandiri Kabupaten Jombang) merupakan kegiatan kepada ex ODGJ melalui poskeswa yang bertujuan agar dapat hidup secara layak dan meningkatkan keberfungsian sosialnya.

4.3 Upaya perbaikan

Upaya perbaikan per sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya kesejahteraan sosial
Perlu dilakukan penguatan program graduasi bantuan sosial menuju kemandirian melalui pemberdayaan ekonomi produktif, peningkatan akses pekerjaan, serta intervensi berbasis keluarga miskin. Selain itu, pemutakhiran data PPKS berbasis indikator

kesejahteraan (kemiskinan, pengeluaran per kapita, dan gini ratio) perlu diperkuat agar program lebih tepat sasaran.

2. Meningkatnya akses terhadap layanan sosial (SPM bidang sosial)
Perbaikan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan (tidak hanya pemenuhan standar), pemerataan akses di wilayah rentan, serta digitalisasi layanan sosial. Selain itu, perlu penguatan indikator akses layanan seperti kesehatan, jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial agar berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

3. Indeks pemenuhan kebutuhan dasar

Upaya perbaikan dilakukan melalui integrasi lintas sektor (kesehatan, pangan, perumahan, air bersih), serta peningkatan intervensi pada indikator utama seperti ketahanan pangan, stunting, akses air minum layak, dan jaminan sosial. Selain itu, perlu penguatan pemanfaatan data sektoral (BPS, Dinkes, BPN) untuk meningkatkan akurasi pengukuran indeks

4. Indeks peranan sosial

Perlu penguatan partisipasi masyarakat rentan dalam perencanaan pembangunan (Musrenbang), peningkatan kapasitas kelembagaan sosial, serta perluasan keterlibatan kelompok rentan (lansia, disabilitas, perempuan, anak). Selain itu, perlu penguatan kohesi sosial melalui peningkatan keterlibatan dalam organisasi sosial dan penurunan angka kekerasan terhadap kelompok rentan

5. Tata Kelola birokrasi yang bersih dan efektif

Upaya perbaikan difokuskan pada peningkatan kualitas implementasi reformasi birokrasi, penguatan digitalisasi (e-government), peningkatan nilai SPI KPK, serta penguatan akuntabilitas kinerja. Selain itu, perlu pengembangan inovasi pelayanan public

Jombang, 23 Maret 2026
KEPALA DINAS SOSIAL



AGUNG HARIADI, ST, MM
NIP.19701126 200212 1 006